

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional di tahun 2018, merupakan tahapan keempat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dengan tema "**Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**". Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2018 dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan *Money Follow Program* melalui pendekatan **Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial**.

Berikut peta permasalahan pembangunan nasional yang termuat dalam RKP 2018, yaitu:

1. Ketimpangan antar wilayah

- ✓ Perekonomian nasional makin bertumpu dipulau jawa yaitu pada tahun 2016 kontribusi PDRB nasional wilayah Jawa yaitu 58,29 tertinggi dibanding wilayah lain dan kontribusi Jawa Timur sebesar 14,95;
- ✓ Peta persebaran dan perkembangan daerah tertinggal di Indonesia sebanyak 122 Kabupaten yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

2. Ketimpangan pendapatan

- ✓ Ketimpangan persebaran penduduk masih terpusat di pulau Jawa dengan 60 % jumlah penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa dengan 7 % dari luas wilayah di Indonesia dan pulau Jawa juga merupakan pulau dengan penduduk terbanyak di dunia.
- ✓ Tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin tahun 2016 untuk Jawa Timur jumlah penduduk miskin tahun 2016 per September sekitar 4.638.530 orang atau sekitar 11,85%.
- ✓ Rendahnya kualitas pekerja menyebabkan produktivitas rendah
 - a. Tenaga kerja di Jawa Timur sebesar 47,56 persen merupakan lulusan SD
 - b. Pelambatan keterampilan pekerja, menyebabkan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan rendah, termasuk dibandingkan negara-negara di ASEAN.
- ✓ Perkembangan golongan pendapatan (Gini Ratio) provinsi menurut kelompok gini ratio tahun 2016 memiliki rata-rata 0,40.

3. Kedaulatan Pangan

- ✓ Penurunan kinerja ekonomi pertanian Indonesia yang dapat dilihat dari volume dan nilai ekspor komoditas pertanian sebesar 5,8 Milliar US\$ pada tahun 2014 mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2016 sebesar 3,4 Milliar US\$.
- ✓ Semakin meningkatnya ketergantungan impor beras untuk mencukupi kebutuhan pangan yang dapat dilihat dari jumlah volume impor beras pada tahun 2015 sebesar 861,6 ribu/ton meningkat sebesar 1,2 juta/ton pada tahun 2016.
- ✓ Semakin menurunnya indikator kesejahteraan petani di Indonesia sebesar 101,49 per desember 2016 menurun menjadi 100,91 per januari 2019.

4. Kedaulatan Energi

- ✓ Konsumsi energi listrik Indonesia per kapita baru mencapai 900 kilowatt hour (KWh) per kapita dengan rasio elektrifikasi sebesar 91,1 persen pada tahun 2016 dengan harapan di tahun 2019 mencapai 97 persen.

5. Kemaritiman

- ✓ Belum adanya sistem logistik yang efisien dan terpadu pada masing-masing kawasan perhatian investasi;
- ✓ Ketimpangan antara kondisi jalan nasional dan jalan daerah berkontribusi pada tingginya waktu perjalanan dan biaya logistik.
- ✓ Peningkatan dan pengembangan pelabuhan sebagai sarana prasarana peningkatan infrastruktur tol laut untuk mempermudah distribusi logistik melalui jalur laut.
- ✓ Makin meningkatnya kegiatan pencurian ikan di wilayah perairan laut Indonesia
- ✓ Belum lengkapnya perangkat hukum dalam implementasi pertahanan dan ketahanan laut serta masih terbatasnya fasilitas untuk melakukan pengamanan laut.

6. Perindustrian dan pariwisata

- ✓ Lonjakan produksi sumber daya alam tetapi tidak untuk kemandirian bangsa
- ✓ Visit Indonesia 2018 merupakan program pemerintah guna mencapai target wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang dan wisatawan nusantara sebanyak 288 juta kunjungan.

7. Kebutuhan dasar, yaitu perumahan, pendidikan, kesehatan

- a. Angka kekurangan rumah (*housing backlog*) di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 13,5 juta unit. Karena hanya mampu memasok 50-62,5 persen total permintaan tahunan.
- b. Target satu juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh pemerintah sampai dengan tahun 2016 masih belum memenuhi target, hal itu dapat dilihat dari realisasi jumlah rumah yang dapat dibangun pada tahun 2016 sebesar 805.169 unit.
- c. Luas permukiman kumuh di Indonesia sampai tahun 2014 diperkirakan mencapai 38.431 ha, sehingga perlu adanya komitmen dan sinkronisasi kebijakan mulai dari tingkat pusat, Provinsi dan daerah dalam upaya mendukung gerakan 100-0-100.

8. Kesenjangan partisipasi pendidikan

- ✓ Disparitas akses pendidikan dasar sudah semakin kecil baik antar daerah maupun antar kelompok sosial-ekonomi. Namun masih perlu upaya besar untuk menjamin semua anak usia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan yang berkualitas;
- ✓ Kualitas guru Masih banyak guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimal sebagaimana diamanatkan UU Guru dan Dosen. 1,5 juta guru yang tersertifikasi (55% dari seluruh jumlah guru;
- ✓ Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Untuk Mendukung Percepatan Penurunan AKI dan AKB serta Pemenuhan *Supply Side* JKN, 2015-2019 dikarenakan status gizi di Indonesia yaitu bayi stunting (pendek) yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

9. Pembangunan dan percepatan infrastruktur

- ✓ Sulitnya proses pengaduan dan pembebasan lahan
- ✓ Lambatnya proses penyusunan peraturan dan keberadaan peraturan yang tumpang tindih sehingga menghambat investasi
- ✓ Ketidakesesuaian perencanaan pendanaan dengan kebutuhan implementasi

Berdasarkan isu strategis dan tantangan pembangunan yang ada, diharapkan dengan tema RKP tahun 2018 **“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**, pemerintah diharapkan mampu untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, sehingga tercapai pemerataan pembangunan yang tentunya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan disparitas antar wilayah di Indonesia.

2.3.2. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 5,86% dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 5,44% dan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 5,44% atau 0,11% dari tahun 2015. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut, di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya investasi yang masuk ke Jawa Timur dimana investasi yang masuk mulai dari tahun 2013-2016 mencapai Rp. 350 triliun, Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi dengan memberikan insentif yang dikeluarkan pemerintah hampir mencapai 60 persen dan pengeluaran pemerintah hingga Ekspor-impor yang mana ekspor-impor Jawa Timur dengan berbagai negara mengalami penurunan, namun, dapat ditutupi dengan kenaikan perdagangan antar daerah yang semakin meningkat. Namun kenaikan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tersebut, tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan di antaranya kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan, kenaikan inflasi, tingginya suku bunga bank dan depresiasi rupiah serta kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, selain itu, revitalisasi mesin dibidang industri yang diharapkan mampu untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah dari produk yang dihasilkan, karena munculnya kawasan-kawasan industri baru hampir di 29 Kota/Kabupaten membuktikan bahwa arah ekonomi Jatim semakin ditopang oleh sektor industri.

Angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 sebesar 4,88% dan tahun 2016 sebesar 5,02%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta pengurangan angka kemiskinan. Akan tetapi, masih ada permasalahan – permasalahan pembangunan yang harus segera diselesaikan agar target visi dan misi dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam di RPJMN 2015–2019, permasalahan dan isu-isu strategis Provinsi Jawa Timur tahun 2018, yaitu:

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Timur tahun 2018, yaitu:

1. Dinamika ekonomi global (melambatnya industri manufaktur, konstruksi dan ekspor China, Negara-negara di Eropa cenderung proteksionis seiring dengan dengan kontraksi ekonomi dan gelombang migrasi, dll)
2. Industri tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi
3. Tenaga kerja sebagian besar
4. Rendahnya konektivitas logistik
5. Rendahnya realisasi investasi yang masuk ke Jawa Timur
6. Kurang berkembangnya industri ekonomi kreatif .

7. Peningkatan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
8. Peningkatan kemampuan dan daya saing koperasi dan UMKM
9. Mengurangi *disparitas* wilayah
10. Perbaikan daya dukung lingkungan yang semakin menurun dan meningkatnya resiko bencana

Sedangkan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2018 adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Belum meratanya akses mutu layanan pendidikan di semua jenjang pendidikan;
2. Masih rendahnya Angka Paritipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan menengah;
3. Masih besarnya angka kemiskinan;
4. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi;
5. Belum optimalnya fungsi dan peran kelembagaan Perlindungan perempuan dan anak.
6. Pembangunan infrastruktur jalan tol (terdapat 10 ruang jalan toldi antaranya jalan tol Mantingan-Kertosono dan Jalan tol Gempol-Pandaan)
7. Pembangunan jalan nasional/strategis nasional non tol (pembangunan jalan lintas pantai selatan Jawa Timur dan Rencana penanganan pansela loan IDB dan loan lanjutan RRDP)
8. Pembangunan sarana dan pra sarana kereta api antar kota (double track Jawa Selatan, pembangunan kereta api cepat Jakarta-Surabaya, Double track lintas timur Surabaya-Banyuwangi dan Pembangunan jalur kereta menuju bandara juanda)
9. Pembangunan/pengembangan bandar udara (pengembangan airport city Juanda, bandara internasional terbatas ABD. Saleh Malang dan Pembangunan bandara Kediri)
10. Pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas, diantaranya dukungan pelabuhan Paciran terhadap tol laut, Pembangunan pelabuhan Prigi Trenggalek, Pelabuhan Boom Banyuwangi)
11. Pembangunan SPAM Umbulan
12. Fenomena perubahan iklim global memberikan dampak terhadap capaian produksi dan produktivitas pertanian;
13. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumber daya alam;
14. Belum optimalnya peran kelembagaan petani;
15. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian;
16. Lemahnya kelembagaan, akses pasar dan akses modal para pelaku UMKM.
17. Belum Efisiennya Sistim Logistik dan sistim distribusi Barang;
18. Masih banyaknya IKM yang belum Terstandarisasi;
19. Dampak Banjir dan Kekeringan;
20. Belum mantapnya konektivitas;
21. Rendahnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni, air bersih, dan sanitasi.

22. Upah pekerja yang masih rendah, jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja dan skil/keahlian tenaga kerja yang masih minim
23. Tingginya tingkat pencemaran lingkungan pada media air dan tanah ;
24. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara sehingga rawan Konflik sosial dimasyarakat;
25. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan melalui e-Government;
26. Rendahnya tingkat konsistensi antar Dokumen Perencanaan;
27. Pengembangan Potensi Penerimaan Asli Daerah (PAD);
28. Kapasitas Fiskal Rendah;
29. Potensi Pengembangan Pembiayaan Pembangunan (non APBD/APBN).
30. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya;
31. Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan
32. Kurangnya aktualisasi, fasilitasi dalam pelestarian budaya daerah;
33. Belum terintegrasinya penanganan sektor pariwisata secara holistik integratif.

2.3.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Jombang

Terlepas dari hasil pencapaian kemajuan pembangunan di Kabupaten Jombang yang diukur dari penilaian evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2016 dan target capaian kinerja pembangunan pada tahun 2017 yang menjadi tolok ukur kinerja pembangunan di Kabupaten Jombang, Kabupaten Jombang masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dan isu strategis yang merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan di tahun 2018. Beberapa permasalahan di Kabupaten Jombang yang menjadi pijakan dalam perencanaan program pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pembangunan sarana prasarana pendidikan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
 Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jombang bersama seluruh *stakeholder* yang ada berupaya menjamin ketersediaan bangunan sekolah dalam kondisi baik. Perkembangan jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik selama dua tahun terakhir menunjukkan tren yang naik. Untuk SD/MI mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2011, yakni dari 63% meningkat menjadi 93,6% pada tahun 2014 menjadi 93,98% pada tahun 2015 dan menjadi 94,16% pada tahun 2016, sedangkan untuk SMP/MTs menunjukkan tren yang menggembirakan yakni meningkat dari 83,99% pada tahun 2011, meningkat menjadi 97,68% pada tahun 2012, naik menjadi 97,88 pada tahun 2014, dan tetap pada tahun 2015 yaitu 97.88%, lalu kemudian sedikit menurun pada tahun 2016 menjadi 97,84%. Adapun untuk SMA/SMK/MA cenderung stabil, yakni dari 91,25% di tahun 2012 meningkat menjadi 94,72 % di tahun 2013 dan naik menjadi 94,77% pada tahun 2014, lalu naik signifikan pada tahun 2015 menjadi 98.17%, namun turun menjadi 96,64% pada tahun 2016. Terlepas dari pencapaian tersebut, sarana dan prasarana pendidikan masih memerlukan

peningkatan kualitas guna memberikan pelayanan dasar yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2014 mengalami peningkatan 0,18 tahun, yaitu dari sebesar 7,67 tahun pada tahun 2013 menjadi sebesar 7,85 tahun pada tahun 2014. Pencapaian rata-rata lama sekolah yang belum maksimal diantaranya disebabkan karena masih cukup besarnya jumlah penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun yang tidak sekolah.

2. Masih rendahnya peningkatan layanan kesehatan, khususnya penurunan AKB dan AKI.

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Sampai dengan tahun 2016 tercatat kematian bayi sejumlah 205 dari 19.815 bayi Lahir Hidup dengan demikian AKB tahun 2016 sebesar 10,35 per 1.000 Kelahiran Hidup. Penyebab kematian bayi terbesar adalah bayi berat badan lahir rendah (BBLR) dan/atau Asfiksia (sesak nafas setelah bayi baru lahir). Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan keluarga dan adanya pergeseran perilaku masyarakat tentang pola konsumsi yang sehat, sehingga asupan yang diterima oleh ibu dan bayi dalam kandungan kurang. Sedangkan penyebab asfiksia tanpa BBLR adalah disebabkan karena trauma lahir. Perlu perhatian Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memperbaiki kondisi peningkatan layanan kesehatan, khususnya penurunan AKB dan AKI.

3. Masih rendahnya kualitas infrastruktur, terutama dalam menunjang kawasan strategis cepat tumbuh dan agropolitan.

Data kondisi jaringan jalan berdasarkan hasil inventarisasi jaringan jalan di wilayah Kabupaten Jombang, menunjukkan bahwa jalan kabupaten sepanjang 665,654 km dengan jumlah ruas jalan sebanyak 195 ruas. Berdasarkan penanganan kondisi jalan dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat. Penanganan kondisi jalan baik mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal itu ditunjukkan pada tahun 2014 kondisi jalan baik sebesar 55,36% meningkat menjadi 69,80% pada tahun 2016, kondisi sedang sebesar 18,07% pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 14,11% pada tahun 2016, kondisi rusak ringan sebesar 12,66% pada tahun 2014 menjadi sebesar 7,57% pada tahun 2016 dan kondisi rusak berat sebesar 13,91% pada tahun 2014 menjadi 8,52% pada tahun 2016. Sedangkan untuk jalan desa sepanjang 550,175 km dengan jumlah ruas jalan sebanyak 304 ruas, dengan kondisi baik sebesar 41,89% pada tahun 2014 meningkat menjadi 55,16, kondisi sedang sebesar 23,43% pada tahun 2014 menjadi 15,55% tahun 2016, kondisi rusak ringan sebesar 19,63% pada tahun 2014 menjadi 14,69 dan kondisi rusak berat sebesar 15,05 pada tahun 2014 menjadi 12,6% tahun 2016. Peningkatan kondisi ruas jalan tersebut, tentunya sangat dipengaruhi dengan semakin berkembangnya pertumbuhan wilayah maka akan terjadi peningkatan volume dan jenis moda kendaraan yang akan membawa pengaruh pada semakin meningkatnya beban kinerja jalan dari segi dimensi maupun jenis perkerasan jalan. Tentunya kondisi ruas jalan yang belum baik akan

mengakibatkan arus transportasi serta distribusi barang dan jasa tidak berjalan lancar.

Sedangkan infrastruktur jaringan irigasi menghadapi permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur irigasi
 - b. Banyaknya jaringan maupun bangunan irigasi yang mengalami kekritisian akibat daya rusak air;
 - c. Masih rendahnya tingkat keandalan tampungan air dalam rangka konservasi, dan memberikan jaminan penyediaan bagi kebutuhan air irigasi dan non-irigasi;
 - d. Belum optimalnya layanan jaringan irigasi akibat rendahnya tingkat operasi dan pemeliharaan berkala, serta masih banyak daerah pertanian yang belum terlayani akibat minimnya kapasitas air permukaan terutama di bagian timur wilayah Kabupaten Jombang;
 - e. Masih belum optimalnya keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air akibat dinamika institusi dan kewenangan.
4. Belum efektifnya penanggulangan kemiskinan.
- Untuk mengukur kemiskinan, Biro Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK).
- Tingkat kemiskinan Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2010-2015 mengalami penurunan sebesar 3.05%, yaitu dari sebesar 13.84% pada 2010 menjadi 10,79% pada tahun 2015 atau turun rata-rata sebesar 0,61% per tahun. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi maka selama kurun waktu 5 tahun tersebut tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang masih jauh lebih baik, namun jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Jombang sedikit lebih buruk.
5. Belum optimalnya pengembangan potensi lokal.
- Turunnya produktivitas pertanian khususnya tanaman pangan yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim yaitu kemarau basah yang mempengaruhi produktivitas tanaman pangan dan tingginya serangan OPT, juga disebabkan menurunnya tingkat kesuburan lahan akibat masih tingginya penggunaan pestisida dan pupuk anorganik
 - Fluktuasi harga pangan masih sangat tinggi hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya fungsi lumbung pangan yang ada sebagai buffer stock atau tunda jual, masih tingginya penjualan saat panen (ijon) sebagai modal tanam kembali dan juga kebutuhan pangan khususnya beras masih sangat tinggi karena tingkat ketergantungan pangan asal beras masih tinggi.
 - Belum optimalnya fungsi lumbung pangan sebagai lembaga tunda jual dan juga sebagai cadangan pangan disaat paceklik bagi anggota dan juga masyarakat sekitar

- Belum optimalnya adopsi teknologi pertanian karena sebagian besar petani masih didominasi generasi tua sehingga memerlukan bimbingan dan penyuluhan yang lebih intensif sedangkan jumlah penyuluh pertanian dan sarana prasarana penyuluhan terbatas; serta bantuan alat mesin pertanian masih ada yang kurang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan petani sehingga perlu memodifikasi alat mesin yang ada disesuaikan dengan kebutuhan petani.
 - Masih rendahnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan ekonomi daerah. Pada kurun waktu 2013-2016 terdapat 325 unit koperasi sehat atau 39,63% dari seluruh jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Jombang. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan perannya antara lain masih rendahnya pengelolaan dan manajemen usaha koperasi dan usaha mikro yang disebabkan oleh rendahnya Sumber Daya Manusia pengelola koperasi dan usaha mikro; masih terbatasnya bidang usaha yang dikelola oleh Koperasi dan usaha mikro; masih rendahnya daya saing produk akibat masih rendahnya kualitas produk usaha mikro serta terbatasnya akses permodalan dengan suku bunga rendah bagi Usaha mikro.
6. Belum stabilnya tingkat pengangguran terbuka.
Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2016 sebesar 6,11% naik sebesar 1,36% dibandingkan tahun 2015. Beberapa permasalahan yang menyebabkan tingginya TPT Kabupaten Jombang adalah terbatasnya kesempatan kerja dibandingkan jumlah angkatan kerja yang ada sehingga tidak seimbang antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja yang ada; Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan/lapangan pekerjaan yang ada dimana kualitas tenaga kerja atau sumber daya manusia penduduk usia kerja masih didominasi penduduk dengan tingkat pendidikan SD serta belum optimalnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
 7. Belum maksimalnya peningkatan pembangunan di daerah.
Dalam menopang pelestarian budaya perlu menjaga eksistensi kelompok seni dan budaya. Pada tahun 2014, ada peningkatan sebesar 25% jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang dapat dilihat dari jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat. Akan tetapi, kenaikan ini masih belum didukung dengan adanya acara atau event tingkat lokal maupun regional serta belum adanya gedung kesenian yang mengakibatkan masih kurangnya motivasi untuk membentuk kelompok seni atau budaya di kemudian hari.
 8. Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi destinasi pariwisata
Menggali dan meningkatkan potensi pariwisata merupakan salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah saat ini merupakan salah satu kebijakan prioritas yang harus menjadi fokus utama dalam pembangunan, karena kondisi keuangan daerah yang baik salah satunya adalah mengurangi ketergantungan dari dana transfer pusat melalui optimalisasi sumber-sumber potensi pendapatan daerah. Dimana masih banyak potensi-potensi pariwisata di Kabupaten Jombang yang bisa digali dan dioptimalkan karena selain potensi alam yang luar biasa,

Kabupaten Jombang juga terkenal dengan kota santri yang mana banyak tersebar pondok-pondok pesantren di wilayah Kabupaten Jombang.

9. Degradasi daya dukung lingkungan dan sumber daya alam

Sejalan dengan perkembangan kota yang sedemikian pesatnya, saat ini Kabupaten Jombang dihadapkan dengan berbagai permasalahan pencemaran baik udara, air maupun tanah. Pencemaran udara akibat asap kendaraan. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Badan lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, sampai dengan bulan Desember 2016 tercatat dari 10 titik pantau, masih terdapat 1 titik lokasi pantau yang memiliki rata-rata kualitas udara yang buruk yang mana jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 9 lokasi pantau yang lainnya.

Disisi lain, pencemaran air saat ini sudah menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Kondisi ini dapat dilihat secara langsung dari kualitas air di saluran drainase kota. Berdasarkan hasil pengamatan BLH Kabupaten Jombang Tahun 2016, pada 18 Sungai yang dilakukan pemantauan terdapat 2 sungai yaitu Sungai Gude Ploso dan Sungai Jombang Wetan yaitu pada bulan September dan Oktober menunjukkan bahwa pada musim kemarau parameter Total Suspended Solid (TSS), Chemical Oxygen Demand (COD), Nitrit (NO₂) dan besi (Fe) semuanya melebihi baku mutu yang ditetapkan melalui PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadinya pencemaran air. Hal ini disebabkan oleh air limbah domestik (rumah tangga), komersial dan industri (UMKM) berupa sisa-sisa pencucian dan air mandi dibuang langsung pada saluran drainase. Indikasi pencemaran tanah juga sudah mulai terjadi di Kabupaten Jombang. Keadaan ini terjadi akibat pada kawasan komersial terjadi ketidaktertiban pelaku usaha seperti bengkel, restoran, café dalam mengelola limbah hasil aktivitasnya sehingga menyebabkan tanah menjadi tercemar. Sedangkan di kawasan permukiman terjadi akibat tidak tersedia sistem pengumpulan air limbah menggunakan tanki septik baik berupa komunal maupun tunggal. Masyarakat saat ini menggunakan tempat penampungan limbah BAB menggunakan sumur penampungan yang tidak kedap sehingga menyebabkan air limbah menyebar di dalam tanah. Kondisi ini harus menjadi perhatian untuk keberlangsungan lingkungan.

10. Genangan dan banjir.

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Jombang yang datar dengan keberadaan cekungan dan tanah yang landai di beberapa bagian menyebabkan wilayah ini sangat rentan terhadap potensi genangan air dan banjir khususnya pada wilayah-wilayah bantaran sungai. Disisi lain perubahan iklim yang terjadi juga telah mempengaruhi pola curah hujan setiap tahunnya, peningkatan suhu permukaan dan pola angin yang berubah-ubah. Genangan dan banjir juga mulai terjadi pada kawasan-kawasan permukiman, hal ini disebabkan oleh peningkatan volume air yang masuk langsung ke sungai disebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air akibat pelanggaran ketentuan Koefisien Dasar Bangunan dan kecenderungan masyarakat menutup tanah dengan semen/beton. Kondisi ini diperparah dengan berkurangnya kapasitas dan daya tampung sungai dan saluran drainase akibat berbagai hal seperti penutupan/penyempitan

parit, pembangunan di bantaran sungai/saluran, pendangkalan akibat sedimentasi yang tinggi serta perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan seperti membuang sampah di saluran dan sungai dapat menghambat aliran air. Permasalahan yang muncul ini sebagai akibat dampak perubahan iklim sehingga perlu diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

11. Pengendalian pemanfaatan ruang kota

Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009-2029 memberikan dasar yang kuat bagi penataan ruang kota, maka salah satu langkah strategis lain yang perlu dilakukan adalah mengoptimalisasikan pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai operasionalisasi rencana kota tersebut diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi yang dapat menjadi acuan dalam membangun ruang kota. Selain itu untuk menjaga konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah disusun diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dengan komitmen tinggi. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang.

12. Pengembangan sistem transportasi.

Sejalan dengan perkembangan Kabupaten Jombang yang sedemikian cepat, kebutuhan akan akses transportasi daerah yang lancar dan aman merupakan isu strategis yang harus diperhatikan. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang sedemikian tinggi di satu sisi, tidak diikuti dengan pertumbuhan jalan yang ideal di sisi lain, sehingga kemacetan mulai sering terjadi. Oleh karena itu, perlu mulai dirintis pengembangan sistem transportasi terpadu untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa serta peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa. Pengembangan sistem transportasi yang mengutamakan pada sistem angkutan umum massal yang bersinergi antara angkutan darat, sungai dan udara diharapkan mampu meningkatkan mobilitas penduduk serta barang dan jasa di Kabupaten Jombang. Setelah fokus pada pelebaran jalan utama, sudah saatnya pengembangan transportasi mulai beranjak menuju penyediaan layanan transportasi massal. Kebijakan pengurangan kendaraan bermotor sudah harus dipertimbangkan mengingat semakin mahal dan langkanya BBM untuk kendaraan pribadi. Selain pengembangan transportasi massal, juga perlu dibangun inner ringroad yang menghubungkan sub-sub pusat pelayanan kota. Hal ini perlu dilaksanakan selain untuk memacu pertumbuhan kawasan juga untuk memberikan alternative pilihan rute bagi kendaraan pribadi sehingga mengurangi beban jalan-jalan utama yang mulai sering terjadi macet. Aspek lain yang juga sangat penting dalam pengembangan sistem transportasi adalah jaringan transportasi dalam kota harus memperhatikan dan terkoneksi dengan sistem transportasi wilayah yang lebih luas sehingga dapat terintegrasi dalam konsep pengembangan wilayah yang lebih luas.

13. Kondisi kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota

Isu terkait dengan perumahan dan permukiman adalah mengenai permasalahan kualitas lingkungan. Hal ini terkait dengan penurunan daya dukung lingkungan serta perilaku masyarakat yang memberikan dampak terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Di beberapa bagian Kabupaten Jombang khususnya permukiman pada daerah tepi sungai serta sekitar pusat aktifitas kegiatan seperti pasar telah muncul kawasan-kawasan kumuh dengan sanitasi yang jauh dari ideal. Disisi lain beberapa kawasan di bagian tengah kota juga mulai menampakkan penurunan fungsi akibat berbagai sebab, seperti dukungan utilitas yang buruk, degradasi lingkungan, citra kawasan sebagai dampak persoalan sosial yang muncul, dan lain sebagainya. Juga terjadi di beberapa bagian wilayah kota dimana perumahan yang dikembangkan dalam skala kecil tanpa mempertimbangkan keterhubungannya dengan kawasan permukiman sekitarnya sehingga menimbulkan berbagai persoalan seperti eksklusivitas, hambatan aksesibilitas kawasan serta gesekan sosial antar kawasan perumahan dengan permukiman yang berada di sekitarnya. Untuk itu diperlukan konsep perencanaan kawasan lingkungan yang sistematis dengan konsep kawasan yang jelas dengan memperhatikan kawasan secara keseluruhan sehingga terbentuk struktur kota yang ideal. Juga diperlukan program perbaikan kawasan lingkungan permukiman dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali. Dalam memenuhi kebutuhan akan rumah sudah mulai harus dirintis pengembangan rumah secara vertikal baik pada kawasan baru maupun pada kawasan kumuh yang pelaksanaannya disesuaikan dengan daya dukung lingkungan setempat, mengingat keterbatasan dan nilai ekonomis lahan yang tinggi. Selain itu, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman juga menjadi salah satu program prioritas nasional yang dikenal dengan 100-0-100 yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah.

14. Pengelolaan air bersih.

Air merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah bagi warganya, semakin berkembangnya kota dan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan tekanan terhadap pemenuhan kebutuhan primer tersebut semakin tinggi. Disisi lain pemerintah Kabupaten Jombang dihadapkan dengan situasi yang kadangkala sangat ekstrim seperti iklim dan cuaca yang tidak dapat diprediksi yang menyebabkan terganggunya proses penyediaan air bersih, tidak hanya kapasitas produksi tidak optimal tetapi juga mengakibatkan kualitas air bersih yang dihasilkan kurang baik, kontinuitas suplai air yang tidak terjaga serta peningkatan biaya pengolahan. Isu strategis lain terkait dengan pengelolaan air bersih adalah tingkat pelayanan yang belum mencakup keseluruhan wilayah dan rumah tangga yang ada. Saat ini tingkat pelayanan air bersih khususnya di wilayah perkotaan baru mencapai 65% penduduk terlayani, artinya masih ada 35% lainnya yang masih belum dapat mengakses air bersih melalui jaringan yang dibangun. Target terdekat yang mutlak harus dipenuhi adalah akses air minum 100% pada tahun 2019. Untuk itu, perlu upaya lebih meningkatkan kapasitas pelayanan sejalan dengan kebutuhan yang juga

terus tumbuh, khususnya bagi masyarakat miskin dan kurang mampu yang memiliki keterbatas akses layanan air bersih.

15. Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan.

Kodisi sanitasi yang ada saat ini di Kabupaten Jombang cukup memprihatinkan terutama dalam hal pengelolaan air limbah domestik. Hal ini terjadi sebagai akibat belum adanya saluran pengumpul dan pengolah air limbah tersebut sehingga air limbah yang dihasilkan rumah tangga langsung dibuang ke saluran. Akibatnya hampir sebagian besar parit/saluran drainase yang ada terpolusi oleh limbah-limbah rumah tangga seperti bahan kimia sisa sabun cuci, sabun mandi, bahkan tercemar oleh air limbah kotoran. Untuk itu isu strategis mengenai aspek sanitasi ini adalah bagaimana memobilisasi sumberdaya dan sumberdana yang ada untuk secara bersama-sama melakukan perubahan perilaku, membuat regulasi yang mengatur secara jelas arah pembangunan sanitasi Kabupaten Jombang serta merealisasikan instalasi pengolahan air limbah baik skala pribadi maupun komunal. Meskipun banyak sekali kendala yang dihadapi untuk melakukannya akan tetapi perlu diambil langkah-langkah untuk mempercepat penuntasan permasalahan sanitasi ini, mengingat sanitasi termasuk dalam target prioritas nasional 100-0-100.

16. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan.

Bahwa sesuai dengan yang telah dituangkan pada RPJMD Kabupaten Jombang 2014-2018, dimana dari salah satu Misi-nya adalah menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan indikator peningkatan prosentase jalan kabupaten dan jalan desa dalam kondisi baik, melalui program percepatan penanganan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan desa dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2018. Berpijak dari cita-cita tersebut, maka mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 akan dilakukan kegiatan rehabilitasi maupun peningkatan pada ruas jalan kabupaten dan jalan desa yang mengalami rusak berat. Perlunya penanganan kondisi jalan yang mengalami rusak berat agar dapat menjadi jalan dalam kondisi baik tersebut dilakukan mengingat dari jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 195 ruas dengan total panjang 666,74 Km, sampai dengan tahun 2015 yang dalam kondisi baik mencapai 64,5% atau sepanjang 430,64 Km, dalam kondisi sedang mencapai 14,2% atau sepanjang 95,34 Km, dalam kondisi rusak ringan mencapai 6,7% atau sepanjang 44,90 Km dan dengan kondisi rusak berat mencapai 14,3% atau sepanjang 95,93 Km. Demikian pula untuk ruas jalan desa sebanyak 304 ruas dengan total panjang 547,65 Km yang dalam kondisi baik masih mencapai 13,6% atau sepanjang 74,71 Km, dengan kondisi sedang mencapai 5,8% atau sepanjang 32 Km, dalam kondisi rusak ringan mencapai 21,8% atau sepanjang 119,49 Km dan kondisi rusak berat mencapai 58,6% atau sepanjang 321,46 Km.

Memperhatikan hal tersebut tentunya dengan adanya percepatan penanganan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan desa dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2018, harapan kita semua bahwa jalan kabupaten dalam kondisi baik dapat tercapai sebesar 85,38% atau sepanjang 569,32 Km sehingga jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan turun sampai dengan 1,56% atau sepanjang 10,38 Km. Selain itu

untuk jalan desa kita juga memiliki harapan yang sama, bahwa sampai dengan tahun 2018 untuk jalan desa dalam kondisi baik dapat mencapai 71,28% atau sepanjang 390,37 Km dan untuk jalan desa dalam kondisi rusak berat turun sampai dengan 8,19% atau sepanjang 44,85 Km. Hal ini dilakukan juga dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standart. Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana salah satu target yang telah ditetapkan yaitu berkenaan dengan peningkatan kualitas layanan jalan minimal 60% dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2019. Sementara untuk penanganan jalan lingkungan telah dialokasikan dana Pagu Indikatif Desa sebesar 200 Juta per desa, yang tentunya dari alokasi tersebut juga sesuai dengan tingkat kebutuhan penanganan yang ada ditingkat desa, serta berasal dari Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa dari pemerintah pusat.

Selain permasalahan yang ada, dari hasil konsultasi publik melalui tahapan musrenbang serta evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, teridentifikasi beberapa isu strategis pembangunan daerah. Isu strategis bisa dimaknai sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang. Adapun isu-isu strategis dalam rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Jombang tahun 2018, yaitu:

1. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun, guna meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat maka perlu mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan juga meningkatkan kualitas lahan yang ada melalui pembangunan infrastruktur pengairan
2. Peningkatan kesempatan kerja melalui penyediaan lapangan kerja/usaha, pendidikan dan pelatihan ketrampilan untuk mengurangi Tingkat pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi
3. Optimalisasi fungsi dan peran lumbung pangan sebagai cadangan pangan masyarakat dan tunda jual guna menstabilkan harga pangan dan meningkatkan pendapatan petani
4. Belum meratanya kesejahteraan masyarakat, khususnya akses terhadap pelayanan dasar;
5. Tingkat pengangguran terbuka;
6. Percepatan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan desa, serta infrastruktur dasar pertanian;
7. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan melalui Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
8. Peningkatan Pembangunan Berbasis Desa.
9. Meningkatnya angka kemiskinan;
10. Ketersediaan sarana prasarana pendukung pendidikan belum merata;
11. Melambatnya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak;
12. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular dan penyakit tidak menular;
13. Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

14. Amanah nawa cita presiden yang harus didukung dan diimplementasikan di daerah;
15. Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan air hujan;
16. Terjadinya pencemaran air yang disebabkan belum adanya sistem pengumpulan air limbah baik skala tunggal maupun komunal;
17. Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan bangunan, penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrim;
18. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;
19. Peningkatan limbah cair, padat, dan B3 tidak disertai dengan sistem pengelolaan yang ideal;
20. Kurangnya penyediaan dan persebaran kawasan ruang terbuka hijau diseluruh kota;
21. Polusi udara yang terjadi akibat meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor;
22. Belum efektifnya sistem pengelolaan sampah kota akibat sarana dan prasarana yang kurang memadai;
23. Pengelolaan TPA dengan control Landfill dan sanitary landfill belum maksimal sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan;
24. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota;
25. Masih terjadi disparitas perkembangan antar wilayah kecamatan membutuhkan percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada wilayah yang relatif tertinggal;
26. Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial;
27. Belum optimalnya instrumen pengendalian fungsi bangunan dihubungkan dengan kesesuaian lahan, khususnya pada kawasan perdagangan dan jasa;
28. Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap rencana tata ruang, sehingga banyak bangunan tanpa IMB;
29. Belum adanya rencana rinci dan integratif dalam pengembangan kawasan permukiman dan pengembangan fasilitas pendukungnya;
30. Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan dan kearifan lokal dalam konsep penataan kawasan kota.
31. Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
32. Belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana dasar terpadu yang menunjang kawasan permukiman;
33. Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, penanganan air limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;

34. Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan sistem tata kelola lalu lintas yang baik serta pertumbuhan kapasitas jalan yang ideal, sehingga mulai terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan kota;
35. Aksesibilitas antar wilayah belum baik terutama antara kawasan utara dan selatan yang dipisahkan Sungai Brantas hanya dihubungkan oleh satu akses jembatan;
36. Kualitas jalan belum seluruhnya baik dan merata;
37. Sistem dan jaringan transportasi masih belum efektif dalam melayani pergerakan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah;
38. Belum ideal dan meratanya kualitas eksisting konstruksi jalan, kapasitas daya dukung jalan dan struktur perkerasan jalan;
39. Menurunnya kuantitas dan kualitas transportasi publik;
40. Belum terintegrasinya sistem drainase yang ada sehingga menyebabkan pengendalian banjir dan genangan belum optimal;
41. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran;
42. Penyediaan layanan air bersih belum dapat mencakup seluruh kawasan/rumah tangga.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Jombang tahun 2016 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2017 dan 2018 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga sebagai penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Pada bab ini akan dibahas kinerja perekonomian daerah berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2018 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, tentunya arah kebijakan ekonomi tahun 2018 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dengan mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi.

Perekonomian Indonesia ke depan masih dihadapkan dengan berbagai tantangan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Adapun isu strategis menyangkut kemiskinan dan kesenjangan adalah: (a) penurunan angka kemiskinan cenderung melambat dan diikuti peningkatan ketimpangan pendapatan antar kelompok penghasilan masyarakat; (b) akses terhadap layanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, permodalan serta skill dan pekerjaan masih terbatas dan belum merata; dan (c) belum adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota menyangkut penetapan target sasaran, implementasi program dan harmonisasi antar program dimana selama ini program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan belum sepenuhnya efektif. Sedangkan isu strategis terkait infrastruktur yaitu: (a) kondisi infrastruktur yang belum optimal; (b) kesenjangan infrastruktur di daerah; (c) perlunya pemeliharaan dan keberlanjutan pasca pembangunan; (d) gap antara perencanaan dan pelaksanaan masih menghadapi hambatan teknis dalam pelaksanaan; dan (e) kebutuhan pendanaan yang besar sedangkan kemampuan anggaran terbatas.

Arah kebijakan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong", dan untuk mencapai salah satu misinya, yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing melalui agenda prioritas (Nawa Cita), antara lain: meningkatkan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Pembangunan ekonomi Nasional tahun 2018 dengan tema **“Memacu Investasi dan Infrastuktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**. Pembangunan Nasional yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mendatang serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antar individu maupun antar wilayah. Prioritas Pembangunan Nasional meliputi: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perumahan dan Permukiman; (4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; (5) Ketahanan Energi; (6) Ketahanan Pangan; (7) Penanggulangan Kemiskinan; (8) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; (9) Pembangunan Wilayah; (10) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. Dengan strategi pembangunan nasional yaitu akselersi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas; pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan akses layanan publik dan kinerja antar daerah, serta ketimpangan pendapatan antar kelompok penghasilan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2018 diharapkan dapat mencapai kisaran 5,4% – 6,1% atau pada titik 5,6%, dengan fokus pembangunan pada tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yaitu industri pengolahan, pertanian dan pariwisata. Sementara itu, konsumsi dan investasi tetap harus menjadi pendorong pertumbuhan. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah fokus pada enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan yaitu:

1. Sektor industri pengolahan terutama non migas ditargetkan mampu tumbuh pada kisaran 5,1%-5,7% atau pada titik 5,3% dan menyumbang 21,2% terhadap PDB;
2. Sektor pertanian ditargetkan mampu tumbuh pada kisaran 3,6%-4,0% atau pada titik 3,8% menyumbang 12,4% terhadap PDB;
3. Sektor perdagangan ditargetkan mampu tumbuh pada kisaran 5,6%-6,3% atau pada titik 5,8% menyumbang 13,3% terhadap PDB;
4. Sektor informasi dan komunikasi ditargetkan mampu tumbuh pada kisaran 10,5%-11,9% atau pada titik 10,9% menyumbang 5,4% terhadap PDB;
5. Sektor konstruksi ditargetkan mampu tumbuh pada kisaran 7,7%-8,4% atau pada titik 7,9% menyumbang 10,2% terhadap PDB; serta
6. Sektor jasa keuangan ditargetkan mampu tumbuh pada kisaran 10,6%-11,5% atau pada titik 11% menyumbang 4,4% terhadap PDB.

Dari sisi pengeluaran konsumsi dan investasi harus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Nasional dengan target pertumbuhan konsumsi pada kisaran 5,2%-5,4% atau pada titik 5,3% dan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) ditargetkan mampu tumbuh pada kisaran 6,3%-8,0% atau pada titik 6,9%. Konsumsi Pemerintah akan relatif terbatas seiring ruang fiskal yang sempit dan prioritas pada alokasi belanja modal. Beberapa langkah konkrit yang perlu dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah, yaitu investasi pemerintah secara selektif dengan fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta. Di

antaranya, infrastruktur transportasi dan logistik dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk dikembangkan seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Pariwisata. Keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada investasi pemerintah, namun harus ada terobosan yang perlu dilakukan yaitu melalui mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Kinerja ekspor masih terbatas seiring dengan lemahnya ekonomi global dan stagnannya harga komoditas, namun ekspor jasa akan meningkat terutama didorong oleh peningkatan pariwisata. Sedangkan dari impor akan tumbuh lebih cepat dari ekspor seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan permintaan domestik.

Peranan Pemerintah untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain melalui:

- 1) Investasi Pemerintah secara selektif melalui: (a) melaksanakan relokasi belanja non produktif ke belanja investasi dan (b) fokus pada proyek yang mendorong produktifitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta melalui infrastruktur listrik; infrastruktur transportasi dan logistik yaitu pelabuhan (penurunan *dwelling time*), pergudangan dan jalan untuk mendukung konektivitas
- 2) Fasilitasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui (a) peningkatan investasi swasta yaitu perlu fokus untuk menghapus hambatan perkembangan swasta di 6 sektor prioritas, deregulasi peraturan investasi (peningkatan kemudahan berusaha), pembenahan iklim investasi di daerah, fasilitasi masalah investasi (RTRW, infrastruktur, penguatan data potensi investasi, penyelesaian pengaduan masalah investasi), pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, perbaikan iklim ketenagakerjaan yaitu penyempurnaan UU ketenagakerjaan untuk harmonisasi UU 13/2003 dengan SJSN; (b) menjaga daya beli masyarakat; dan (c) reformasi struktural.

Pembangunan Nasional tahun 2018 masih menerapkan prinsip *Money Follow Programs* melalui pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial dengan diperkuat oleh empat fokus perkuatan yaitu:

- (1) Perkuatan perencanaan dan penganggaran melalui penajaman prioritas nasional dan program prioritas;
- (2) Perkuatan pengendalian perencanaan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga level proyek atau "satuan 3";
- (3) Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang memfokuskan aspek spasial hingga detail rencana lokasi pembangunan dan
- (4) Perkuatan integrasi sumber pendanaan baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun badan usaha serta melalui skema KPBU dan PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah).

Perkembangan perekonomian Jawa Timur dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Global dan juga Nasional, demikian juga dengan tantangan pembangunan perekonomian Jawa Timur yaitu (a) dinamika global

melambatnya sektor perdagangan sebagai akibat dari dinamika solvabilitas (kemampuan bank untuk menjaga likuiditas) pasar keuangan yang tinggi; (b) middle income trap disebabkan industri tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja kurang berkualitas dimana sebagian besar lulusan SD, masih rendahnya konektivitas logistik, rendahnya realisasi investasi yang masuk dan kurang berkembangnya industri ekonomi kreatif; (c) bonus demografi dengan persentase penduduk usia produktif usia 15-64 tahun mencapai 69,54% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 69,59% maka akan memberikan keuntungan yang besar bila mampu mengoptimalkan karena merupakan potensi pasar yang sangat besar, mampu menciptakan ide kreatif dalam pemanfaatan sumber daya alam yang sangat terbatas, mampu menciptakan output yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya tabungan masyarakat untuk investasi pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Timur sesuai tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2018, **“Memacu Pembangunan Infrastruktur dalam rangka meningkatkan Industri, Perdagangan, Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur”**.

Target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2018 berkisar antara 5,61-5,96%, dengan strategi meningkatkan industri dan perdagangan melalui pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pembangunan infrastruktur transportasi, energi, jalan dan sumber air.

Pada regional Kabupaten Jombang, pembangunan ekonomi daerah sebagaimana tema pembangunan tahun 2018 yaitu “Perwujudan Jombang Sejahtera untuk Semua”, yaitu mampu mewujudkan kehidupan masyarakat Jombang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi antara lain pemenuhan kecukupan energi 4.300 kalori/kap/hari dan protein 110 gr/kap/hr, terpenuhinya rumah yang layak huni, tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terpenuhinya kebutuhan pendidikan, meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Merujuk pada tema tersebut dan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dan juga pemerintah provinsi Jawa Timur, program-program pembangunan tahun 2018 diprioritaskan untuk pengembangan sumberdaya manusia dan penyediaan infrastruktur penunjang pembangunan ekonomi serta pencapaian kemandirian pangan. Skenario kebijakan ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2018 dijabarkan secara detail pada sub bab 3.1.2.

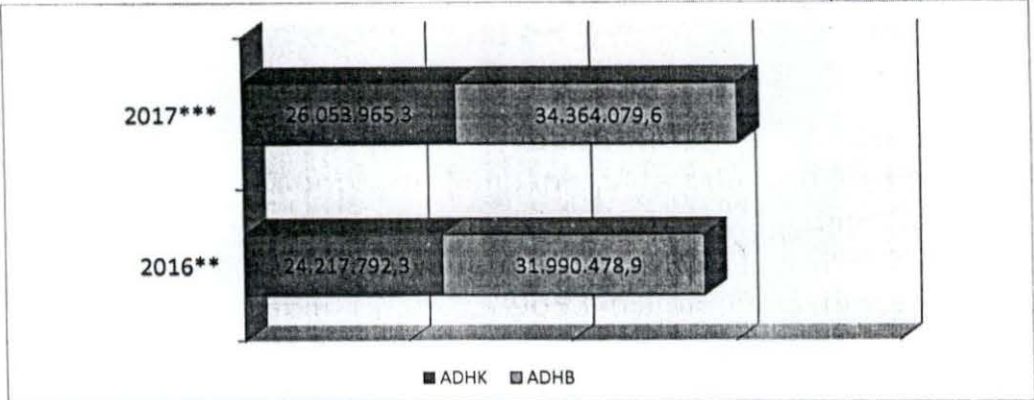
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemakmuran masyarakat yang sudah tercapai sebagai tolok ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun).

PDRB ADHB Kabupaten Jombang tahun 2016 mencapai Rp.31,9904789 triliun, meningkat sebesar Rp. 2,842511 triliun atau 9,75% dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai Rp. 29,1479679 triliun dan diperkirakan dapat

mencapai Rp.34,3640796 triliun pada tahun 2017 atau tumbuh 7,42%. Sedangkan PDRB ADHK Kabupaten Jombang pada tahun 2016 mencapai Rp. 24,2177923 triliun meningkat sebesar Rp. 1,257545,4 triliun atau 3.93% dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai Rp. 22,9602469 triliun dan diperkirakan dapat mencapai Rp.26,0539653 triliun pada tahun 2017 atau tumbuh 7,58%.

Gambar 3.1
Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010
Kabupaten Jombang Tahun 2016-2017
(Triliun Rupiah)



Sumber Data : BPS Kab. Jombang
** angka sangat sementara
*** angka sangat sangat sementara.

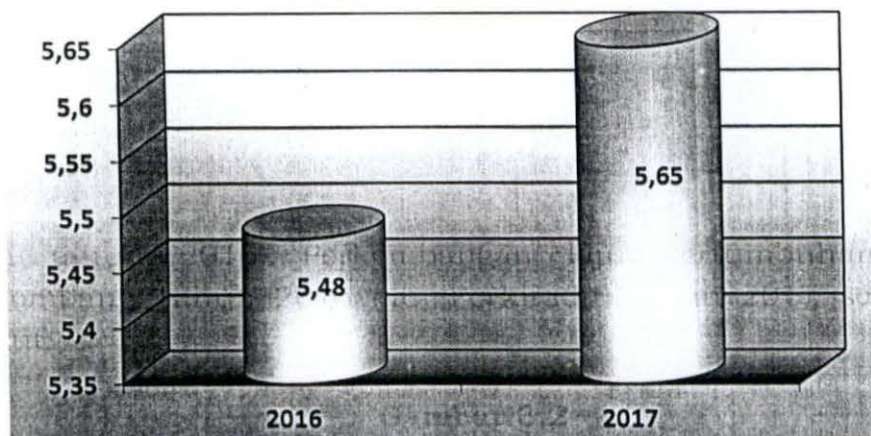
Perekonomian Kabupaten Jombang didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha yaitu Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Kabupaten Jombang dengan nilai sebesar 22,73% dan mengalami perlambatan 0,66 poin dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 22,57%. Kontribusi terbesar kedua ditempati oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,38%, lapangan usaha ini mengalami percepatan 0,82 poin dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai 21,60%. Kontribusi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami peningkatan karena meningkatnya produksi dan juga harga komoditi pertanian Dan kontribusi terbesar ketiga ditempati oleh lapangan usaha industri pengolahan, dimana lapangan usaha ini mengalami perlambatan sebesar 0,17 poin dari 19,66% pada tahun 2016 menjadi 19,58% pada tahun 2017.

Perlambatan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan lapangan usaha industri pengolahan bukan berarti kategori ini tidak tumbuh melainkan kecepatan tumbuhnya masih kalah cepat atau dibawah pertumbuhan 15 (lima belas) lapangan usaha lainnya. Peranan ketiga kategori tersebut sangat besar dibandingkan keempat belas kategori lainnya, namun Pemerintah Kabupaten Jombang terus berupaya dalam menumbuhkan kategori lainnya dengan harapan terjadi pemerataan disegala bidang dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

Perekonomian Kabupaten Jombang tahun 2016 tumbuh sebesar 5,48% mengalami percepatan sebesar 0,12 poin bila dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 5,36%. Dan diperkirakan dapat tumbuh sebesar 5,65% pada tahun 2017 mengalami percepatan 0,17 poin bila dibandingkan dengan

pertumbuhan tahun 2016. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.2
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang
Tahun 2016 – 2017
(dalam %)

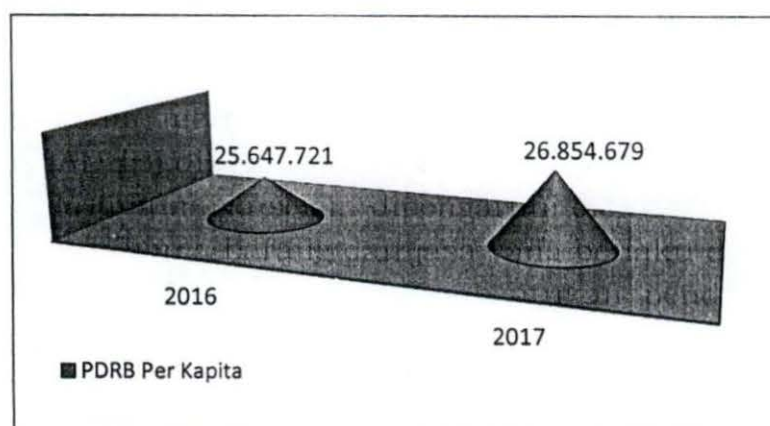


Sumber Data : BPS Kab. Jombang Tahun 2016

Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang adalah dengan melihat PDRB perkapita. Hal ini penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi.

PDRB Per kapita merupakan indikator makro yang secara agregat dihitung dari PDRB (ADHB) dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita pada umumnya selain dipengaruhi oleh faktor produksi juga sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang berlaku dipasar sehingga pengaruh inflasi cukup dominan dalam pembentukan pendapatan regional Kabupaten Jombang. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Jombang tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.3
Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Tahun 2016-2017
(dalam Rupiah)



Sumber data : BPS Kab. Jombang, tahun 2016, diolah

**) Data tahun 2015 adalah angka sangat sementara

**) Data tahun 2016 adalah angka sangat sangat sementara

Pada tahun 2016 PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Jombang mencapai Rp.25.647.721 diperkirakan tahun 2017 mencapai Rp.26.854.679 atau meningkat 4,71% jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp.25.647.721. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang semakin membaik sejalan dengan berbagai kebijakan Pemerintah khususnya kebijakan akan pemberdayaan perekonomian rakyat.

Inflasi tahunan (year of year/YoY) atas dasar harga konsumen Kabupaten Jombang tahun 2016 mencapai 1,60 persen turun sebesar 0,33 poin dibandingkan inflasi tahun 2015 yang mencapai 1,99 persen dan diperkirakan inflasi tahun 2017 dapat ditekan dibawah 1,60%. Di tingkat Jawa Timur, inflasi Kabupaten Jombang menduduki peringkat ke 7 (tujuh) dibawah Banyuwangi, Jember, Sumenep, Madiun, Malang dan Surabaya dan masih dibawah inflasi Jawa Timur yang mencapai 2,74 persen.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Prospek ekonomi tahun 2018 sangat ditentukan oleh tujuan pembangunan ekonomi, masalah yang harus diselesaikan dan tantangan yang harus dihadapi termasuk perkembangan ekonomi dunia, Indonesia maupun Provinsi Jawa Timur, kebijakan yang akan diambil, serta sasaran yang ingin dan diperkirakan dicapai dalam tahun 2018. Untuk mewujudkan misi meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi, perlu diupayakan langkah-langkah yang sungguh-sungguh dalam mendorong investasi, ekspor, konsumsi, maupun pengeluaran pemerintah.

Untuk mewujudkan perekonomian yang lebih mandiri, sektor-sektor strategis ekonomi domestik perlu lebih digiatkan dan harus didukung dengan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Disamping itu, untuk mendukung kebijakan Pemerintah perlu dibangun kedaulatan pangan, pembangunan industri pengolahan dan pembangunan pariwisata sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kreatif, baik untuk memenuhi kebutuhan ekspor maupun kebutuhan lokal. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus disertai upaya-upaya keberpihakan untuk mengurangi kesenjangan dengan memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan baik antara pendapatan maupun antar wilayah. **Kesemuanya ini diharapkan akan dapat tercapai pada tahun 2018 dengan asumsi:** (1) Perekonomian Nasional terus mengalami pertumbuhan; (2) Tidak ada krisis ekonomi dunia serta (3) Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Dengan arah kebijakan yang ditetapkan diharapkan kinerja faktor-faktor ekonomi mampu meningkat pada tahun 2018, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,65%. Pembangunan ekonomi secara komprehensif mendorong industri pengolahan dapat meningkat dan pada tahun 2018 ditargetkan mampu tumbuh sebesar 4,66%. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan dapat tumbuh mencapai 2,07% pada tahun 2018. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, maka tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka

diupayakan dapat menurun pada akhir tahun 2018 yang merupakan akhir tahun RPJMD.

Untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan ditempuh langkah-langkah konkret untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang berkualitas, diantaranya: (1) Meningkatkan produktivitas dengan melakukan akselerasi tenaga kerja ke sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi, termasuk sektor pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar dan membantu mencapai kedaulatan pangan serta sektor industri yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup, (2) Meningkatkan standar hidup pekerja melalui penyediaan lapangan kerja produktif. Terbukanya lapangan kerja baru membutuhkan investasi baru yang dapat menjadi sarana meningkatkan pendapatan penduduk.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar seri 2010 Harga Berlaku tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp.34.364.079,6 juta, dan Produk Domestik Regional Bruto seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp.27.304.651,9 juta. Dari sisi produksi, perekonomian Kabupaten tahun 2018 ditopang oleh tiga lapangan usaha dominan, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi 21,78% diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi 21,41% dan Industri Pengolahan sebesar 19,87%.

Untuk menyambut tantangan ekonomi nasional dan Jawa Timur serta menjaga agar peningkatan ekonomi di Jombang tetap tumbuh, maka pada tahun 2018 ditetapkan kebijakan pembangunan ekonomi Jombang sebagai berikut:

1. Penguatan Ketahanan Pangan

Guna mencapai penguatan ketahanan pangan dilaksanakan melalui upaya meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, perkebunan dan peternakan yaitu komoditas padi, jagung, kedelai, tebu dan juga produksi daging sapi. Untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui pembangunan infrastruktur pertanian dan penggunaan bibit unggul serta perluasan produk agroindustri, peningkatan daya saing produk industri pengolahan, pengembangan ekowisata, agrowisata, wisata budaya, serta peningkatan pengetahuan dan *skill* pelaku ekonomi serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Menjaga ketahanan pangan daerah melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan dengan pemberdayaan lumbung pangan desa untuk mewujudkan desa mandiri pangan serta diversifikasi pangan.

2. Peningkatan Peran Koperasi dan UM

Peningkatan peran koperasi dan Usaha Mikro melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk serta meningkatkan akses UM pada sumberdaya produktif termasuk fasilitasi sumber pembiayaan serta mendorong dan memfasilitasi kemitraan usaha antara pengusaha besar dan menengah dengan pelaku usaha mikro.

3. Penumbuhan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh, serta Pelestarian Kearifan dan Budaya Lokal

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi serta untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi dalam rangka menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan kebijakan pembangunan ekonomi di atas dapat memberikan jawaban akan tantangan yang berkembang secara nasional dan regional pada tahun 2018, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean yang sudah mulai diberlakukan tahun 2015. Komoditas unggulan Kabupaten Jombang diharapkan mampu bersaing dengan komoditas dari negara-negara ASEAN, baik secara kualitas maupun harga. Penggunaan teknologi yang tepat guna serta efisiensi produksi diharapkan menjadi langkah strategis Kabupaten Jombang dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan *high technology goods*.

Selain kenaikan energi untuk produksi, di Kabupaten Jombang dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan upah pekerja cukup signifikan. Kenaikan Upah Minimal Kabupaten (UMK) direspon negatif oleh pelaku usaha industri dengan mengurangi jumlah tenaga kerja dan relokasi tempat industri. Selain itu, kualitas pekerja di Kabupaten Jombang masih jauh dari harapan dimana pekerja yang menyelesaikan pendidikan setingkat SD mendominasi total pekerja di Kabupaten Jombang, meskipun dengan kecenderungan menurun.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif khususnya dalam bidang keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah serta kenaikan atau penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang telah dibahas sebelumnya yang sangat berpengaruh terhadap meningkatnya atau menurunnya pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah yang tertuang dalam program dan kegiatan. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah.

Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kabupaten Jombang Tahun 2018 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2018 yang merupakan tahun terakhir, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jombang. Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada tahun 2018 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib terkait pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar maupun urusan pilihan yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga difokuskan pada belanja untuk mendukung peran Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajiban, efisien dan efektif.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik urusan Pemerintahan yang absolut maupun urusan pemerintahan konkuren. Berdasarkan pada hasil analisis

dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah yang perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD

Perhitungan kerangka pendanaan pada tahun 2018 menggunakan pendekatan realisasi APBD Tahun Anggaran 2014-2016, dengan memperhatikan perkembangan proyeksi anggaran pada P-APBD 2017, arah kebijakan fiskal Pemerintah dalam rencana pembangunan nasional tahun 2018 serta kebijakan Pemerintah Provinsi serta isu-isu terkait pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data realisasi APBD pada tahun anggaran 2014-2016 dan proyeksi pada P-APBD tahun anggaran 2017, total pendapatan daerah secara nominal terus mengalami kenaikan meskipun tidak seimbang dengan kenaikan kemampuan riil keuangan daerah.

Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, secara proporsi pendapatan dana perimbangan terhadap total pendapatan menunjukkan kecenderungan terus naik dan sebaliknya pada proporsi pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan struktur pendapatan daerah mulai tahun 2016, terkait adanya dana alokasi khusus fisik dan non fisik, proporsi dana perimbangan naik menjadi 65,55% pada tahun 2016 yang sebelumnya 54,42%. Berikut disampaikan proporsi masing-masing komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah.

Tabel 3.1
Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan Asli Daerah	15.95	16.92	16.58	15.20
2	Dana Perimbangan	59.36	54.42	65.55	64.86
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	24.69	28.66	17.87	19.94
	PENDAPATAN DAERAH	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang, Tahun 2017

Berdasarkan pada analisa terhadap data keuangan daerah selama lima tahun ke belakang, maka pendapatan tahun 2018 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 6,71% dibandingkan dengan proyeksi pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2017 dengan beberapa asumsi yang mendasarinya. Analisa terhadap pertumbuhan pendapatan antara tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018 tidak dapat diperbandingkan karena ada beberapa item pendapatan daerah yang tidak dimasukkan dalam proyeksi tahun 2018 untuk dana dana yang bersifat given atau diarahkan dengan pertimbangan tertentu. Item pendapatan yang tidak dimasukkan dalam proyeksi pendapatan daerah yaitu bagi hasil cukai, DAK fisik dan beberapa komponen DAK non fisik serta bantuan keuangan Pemerintah Propinsi.

Proyeksi kemampuan keuangan tahun 2018 didasarkan pada hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama lima tahun terakhir, dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi terkini kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta proyeksi atas belanja yang didanai dari dana alokasi khusus non fisik yang didasarkan pada alokasi tahun sebelumnya. Proyeksi atas pendapatan daerah tersebut merupakan agregat dari proyeksi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD yang terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 10,34% pada tahun 2018. Dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 11,66% dengan asumsi besaran dana alokasi khusus yang dialokasikan adalah DAK non Fisik untuk tunjangan profesi guru yang disamakan dengan alokasi tahun sebelumnya. Sedangkan Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 2,48%.

3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Analisis sumber pendapatan daerah dirumuskan dengan mendasar pada pertumbuhan proporsi masing-masing pos penerimaan pendapatan daerah dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun anggaran, realisasi pendapatan tahun 2016, proyeksi pendapatan pada perubahan APBD tahun anggaran 2017, serta mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

Secara umum pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Jombang masih bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan realisasi tahun 2016 proporsi dana perimbangan masih pada kisaran 65,55 persen dan PAD menyumbang sebesar 16,58 persen). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jombang masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan

daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2018 masih mengacu kebijakan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
2. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
5. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.
6. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;

Dari realisasi penerimaan pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir (2014–2016), menunjukkan bahwa kontribusi terbesar adalah dari Pos Pendapatan Dana Perimbangan yang rata-rata proporsinya mencapai 59,78%, diikuti oleh pos Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 23,74% dan pos Pendapatan Asli Daerah sebesar 16,48%. Sedangkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 10,34% dari APBD tahun anggaran 2017, dengan asumsi PAD diproyeksikan minimal sama dengan realisasi tahun anggaran 2016 serta mempertimbangkan hal-hal tertentu. Sedangkan proyeksi perkembangan komponen PAD dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - o Pajak daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 7,67% dengan komponen penyumbang terbesar ada pada pajak penerangan jalan, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - o Hasil retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 6,64% dengan komponen penyumbang terbesar ada pada retribusi jasa umum;
 - o Hasil pengelolaan kekayaan daerah diasumsikan mengalami penurunan dengan alokasi tahun 2017 dengan memperhatikan perkembangan pada P-APBD 2017;
 - o Untuk komponen lain-lain PAD yang sah pada tahun 2018 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 12,26% jika dibandingkan tahun 2017 dengan komponen terbesar kenaikan berasal dari kenaikan pendapatan BLUD RSUD Jombang;
2. Dana perimbangan diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 11,66% dari proyeksi APBD tahun anggaran 2017 dengan tetap memperhatikan arah kebijakan transfer ke daerah dan dana desa dari pemerintah pusat

yang dialokasikan sesuai dengan money follow program untuk mendukung implementasi nawacita dengan penganggaran, pengalokasian dan penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan anggaran dan capaian output program dan kegiatan. Penyaluran dana dari pemerintah pusat berbasis realisasi penerimaan (PDN Netto) yang artinya bahwa alokasi dana perimbangan tidak bersifat baku. Berikut beberapa asumsi yang mendasari proyeksi dana perimbangan:

- a) Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak diasumsikan mengalami penurunan sebesar 5,15% dari alokasi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak pada APBD Tahun Anggaran 2017. Hal ini disebabkan karena
 - proyeksi atas bagi hasil dari bea cukai belum dialokasikan dengan mempertimbangkan kemungkinan akan ada perubahan kebijakan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan perluasan penggunaan DBH Cukai hasil tembakau.
 - Alokasi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak diasumsikan sama dengan alokasi bagi hasil pajak/bukan pajak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2016.
 - b) Pertumbuhan dana alokasi umum diproyeksikan sama dengan alokasi tahun 2017;
 - c) Alokasi dana alokasi khusus terdiri dari:
 - DAK fisik belum dialokasikan pada RKPD tahun 2018 dengan mempertimbangkan beberapa perubahan pola kebijakan atas mekanisme pengusulan DAK, Bidang-bidang DAK dan ruang lingkungannya.
 - DAK non fisik hanya dialokasikan untuk tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD sesuai dengan alokasi tahun 2017.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diasumsikan mengalami penurunan sebesar 2,48% dari APBD tahun anggaran 2017, dengan asumsi:
- a) Alokasi dana bagi hasil pajak dari Provinsi diproyeksikan naik sebesar 2,14% dibandingkan dengan alokasi tahun 2016 dengan memperhatikan proyeksi pada perubahan APBD tahun 2017 sesuai dengan surat Gubernur Jawa Timur Nomor 970/5946/202.4/2017 tentang informasi alokasi sementara bagi hasil pajak daerah pada APBD TA 2017;
 - b) Alokasi untuk dana penyesuaian dan otonomi khusus yang merupakan Dana Insentif Daerah diasumsikan turun sebesar 22,07% dari alokasi tahun anggaran 2017 dengan mempertimbangkan perubahan indikator dan penentuan variable penilaian serta perubahan syarat penyaluran sesuai dengan PMK 50/pmk.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa ;
 - c) Dana Desa diasumsikan sama dengan alokasi tahun anggaran 2017 sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah tahun 2018, maka kebijakan pendapatan daerah tahun 2018 diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai dengan melakukan berbagai upaya peningkatan pendapatan daerah dari segala sektor baik Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan

daerah yang sah. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target pendapatan daerah antara lain dilakukan dengan:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang diupayakan melalui:
 - penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - Melakukan pendataan obyek pajak dan wajib pajak baru;
 - Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDM serta fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah yang mempunyai pendapatan daerah;
 - penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - Mengoptimalkan secara bertahap potensi Pajak Bumi Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan dengan melakukan pendataan ulang sesuai kondisi eksisting dan dilakukan penyesuaian data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
 - optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah
 - Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD penghasil dalam upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD.
2. Dana perimbangan dan dana bagi hasil perlu dikelola dengan sebaik-baiknya dan diupayakan ketepatan serta kelancaran dalam pelaporan dan realisasinya, karena terdapat perubahan kebijakan atas dana transfer ke daerah dan dana desa yang mendasarkan pada kinerja penyerapan dana dan ketercapaian output untuk efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Perlu dilakukan penjadwalan terkait per tahapan kegiatan khususnya yang dibiayai dari dana alokasi khusus agar pendapatan yang sudah ditargetkan dapat semaksimal mungkin diterima. Alokasi dana perimbangan tersebut relatif sulit untuk diperkirakan jumlah alokasinya, karena sangat bergantung pada pemerintah pusat. Untuk itu, perlu dilakukan upaya peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat serta peningkatan kualitas data kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
3. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program strategis daerah yang diusulkan untuk dibiayai melalui dana alokasi khusus;
4. Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi untuk sinergitas program pembangunan daerah yang bisa dibiayai dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan evaluasi selama lima tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten Jombang selalu mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dengan pertumbuhan yang berfluktuatif.

Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2018 dan 2019, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, didasarkan pada perkembangan pendapatan dalam struktur APBD beberapa tahun terakhir dengan melihat rata-rata pertumbuhan per tahunnya. Pendapatan daerah pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp.2.184.053.387.921. Proyeksi tersebut diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2016 dan Target/Proyeksi Tahun 2017-2019

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2015 (n-3)	Realisasi Tahun 2016 (n-2)	Tahun Berjalan APBD 2017 (n-1)	Proyeksi/Target Tahun 2018 (n)	Proyeksi/Target Tahun 2019 (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Pendapatan Asli Daerah	363,963,252,972	374,176,185,825	344,415,880,840	380,016,609,196	400,263,774,870
1.1.1	Pajak daerah	80,335,178,829	91,478,979,886	81,613,310,000	87,870,000,000	89,978,674,275
1.1.2	Retribusi daerah	39,925,263,477	41,890,164,298	42,102,219,585	44,896,615,131	50,511,814,721
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2,844,232,695	2,434,763,292	3,083,855,255	2,949,999,180	2,893,191,500
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	240,858,577,971	238,372,278,350	217,616,496,000	244,299,994,885	256,880,094,374
1.2	Dana Perimbangan	1,170,782,676,685	1,479,480,105,860	1,561,271,845,575	1,399,820,283,628	1,397,879,936,228
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	75,132,309,685	85,303,667,270	80,690,653,575	76,538,105,628	74,597,758,228
1.2.2	Dana alokasi umum	1,032,325,237,000	1,111,301,450,000	1,111,301,450,000	1,111,301,450,000	1,111,301,450,000
1.2.3	Dana alokasi khusus	63,325,130,000	282,874,988,590	369,279,742,000	211,980,728,000	211,980,728,000
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	616,541,944,396	403,443,066,096	435,571,757,791	424,752,295,097	424,752,295,097
1.3.1	Hibah	917,108,600	1,598,448,599	2,434,150,000	-	-
1.3.2	Dana darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	121,442,913,796	131,311,278,997	137,561,480,791	140,506,682,097	140,506,682,097
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	325,278,336,000	45,777,657,000	51,330,514,000	40,000,000,000	40,000,000,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	82,334,153,000	33,009,866,500	-	-	-
1.3.6	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Pusat	86,569,433,000	191,745,815,000	244,245,613,000	244,245,613,000	244,245,613,000
1.3.7	Pendapatan bagi hasil lainnya dari profinsi					
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)	2,151,287,874,053	2,257,099,357,781	2,341,259,484,206	2,204,589,187,921	2,222,896,006,195

Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2017 (diolah)

3.2.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada Tahun 2017 pemerintah telah merubah prinsip dari yang menggunakan prinsip *money follow function*, karena manfaatnya tidak jelas, diubah menjadi *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan tahun 2018. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ruang fiskal daerah menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2018 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Dengan memperhatikan proyeksi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan belanja daerah tahun 2018 diarahkan sebagaimana berikut:

A. Kebijakan belanja tidak langsung, yaitu:

1. Mengalokasikan anggaran untuk pembayaran gaji 13 dan 14 dan accres 2,5% untuk mutasi PNS termasuk kenaikan gaji pokok dan berkala serta kenaikan tunjangan keluarga;
2. Mengalokasikan kenaikan tunjangan penghasilan;
3. Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Mengalokasikan kenaikan tunjangan perumahan DPRD;

5. Mengalokasikan dana kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dalam bentuk belanja hibah kepada KPU, Panwaslu dan hibah dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban pada saat pelaksanaan PILKADA;
6. Pengalokasian dana ke pemerintah desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, untuk peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta akselerasi atau percepatan pembangunan desa yang dilakukan melalui:
 - o Alokasi dana desa minimal sebesar 10% dari total dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - o Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi minimal sebesar 10% dari alokasi pajak daerah dan retribusi daerah dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - o Dana desa yang berasal dari APBN dialokasikan dan didistribusikan ke Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o Pengalokasian pembiayaan program Pagu Indikatif Desa yang merupakan kewenangan desa.
7. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundangan.

B. Kebijakan belanja langsung, yaitu:

1. Dalam perencanaan program dan kegiatan, Perangkat Daerah harus memperhatikan RPJMD Tahun 2014-2018 dan Renstra Perangkat Daerah pada pentahapan tahun 2018, dengan melihat capaian pentahapan pada tahun sebelumnya;
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan:
 - Infrastruktur layanan dasar publik dan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran minimal sebesar 25% dana transfer umum sesuai dengan PMK 50 /PMK.07/2017 dan Undang- undang tentang APBN Tahun 2107.
 - Melaksanakan program pembangunan yang dijangkit melalui musrenbang, terutama program kegiatan Pagu Indikatif Desa sebesar Rp.200.000.000,- per desa yang diarahkan pada bidang infrastruktur, bidang pertanian serta bidang pendidikan sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pagu Indikatif Desa;
 - Pengalokasian anggaran untuk belanja yang persentasenya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:
 1. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan minimal 20% dari belanja daerah;
 2. Anggaran urusan kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja daerah diluar gaji;
3. Pengalokasian anggaran untuk belanja yang persentasenya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan minimal 20% dari belanja daerah;
 - Anggaran urusan kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja daerah diluar gaji;
 - Perencanaan program dan kegiatan juga diupayakan untuk dapat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui sinkronisasi, integrasi dan sinergitas program/kegiatan;
3. Dalam perencanaan program dan kegiatan, Perangkat Daerah harus memperhatikan RPJMD Tahun 2014-2018 dan Renstra Perangkat Daerah pada pentahapan tahun 2018, dengan melihat capaian pentahapan pada tahun sebelumnya;
 4. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, Ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan;
 5. Perencanaan program dan kegiatan juga diupayakan untuk dapat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui sinkronisasi, integrasi dan sinergitas program/kegiatan;
 6. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang;
 7. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

Adapun realisasi belanja daerah tahun 2015-2016 dan proyeksi tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015-2016 dan Target/Proyeksi Tahun 2017-2019

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)				
		Realisasi Tahun 2015 (n-3)	Realisasi Tahun 2016 (n-2)	Proyeksi Tahun 2017 (n-1)	Proyeksi/Target Tahun 2018 (n)	Proyeksi/Target Tahun 2019 (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	955,864,129,231	1,024,973,451,933	1,075,615,833,819	1,098,396,845,823	1,099,783,039,517
2.1.4	Belanja hibah	51,340,643,428	63,783,125,400	67,373,047,390	134,438,396,130	76,534,486,490
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1,480,050,000	2,778,574,000	4,987,600,000	4,267,000,000	15,248,880,000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa*	241,573,383,144	377,742,356,497	425,435,976,316	417,181,496,727	390,334,582,722
2.1.8	Belanja tidak terduga	0	16,730,400	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
A	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,250,258,205,803	1,469,294,238,230	1,574,412,457,525	1,655,019,895,280	1,582,900,988,729
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai	50,208,345,487	56,587,117,969	73,944,741,580	55,567,505,205	62,086,671,419
2.2.2	Belanja barang dan jasa	461,266,682,369	473,798,460,300	488,380,690,826	367,005,090,556	410,062,038,638
2.2.3	Belanja modal	403,219,792,974	364,901,756,772	354,732,629,861	266,572,129,879	297,846,307,409
B	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	914,694,820,830	895,287,335,041	917,058,062,267	689,144,725,641	769,995,017,466
C	TOTAL JUMLAH BELANJA	2,164,953,026,633	2,364,581,573,271	2,491,470,519,792	2,344,164,620,921	2,352,896,006,195

Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2017 (data Diolah)

3.2.2. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah, sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, pencairan dari dana cadangan. Sedangkan pembiayaan pengeluaran dilakukan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian, yaitu: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2018 diarahkan untuk menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu yang ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017;

Adapun realisasi, target/proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015-2016 dan Target/Proyeksi Tahun 2017-2019

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2015 (n-3)	Realisasi Tahun 2016 (n-2)	Proyeksi Tahun 2017 (n-1)	Proyeksi/Target Tahun 2018 (n)	Proyeksi/Target Tahun 2019 (n+1)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	355,195,113,339	336,445,575,812	150,211,035,587	139,575,433,000	130,000,000,000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	68,267,779	20,784,475			
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	444,889,774	708,278,761			
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	355,708,270,892	337,174,639,048	150,211,035,587	139,575,433,000	130,000,000,000
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	5,500,000,000				
3.2.3	Pembayaran pokok utang	97,542,500	1,319,106,544			
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5,597,542,500	1,319,106,544	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	350,110,728,392	335,855,532,504	150,211,035,587	139,575,433,000	130,000,000,000

Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2017

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018

Prioritas pembangunan merupakan tingkatan atau urutan kondisi untuk menentukan dan membandingkan seberapa besar atau seberapa penting suatu hal yang harus dilakukan. Dalam menentukan prioritas masalah dilakukan melalui kesepakatan sehingga suatu masalah dapat dilihat lebih objektif tingkat kepentingannya maupun penyelesaiannya. Oleh sebab itu, dengan banyaknya permasalahan yang ada, pemerintah daerah harus memiliki prioritas pembangunan guna mengatasi segala permasalahan yang ada di daerah. Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan SKPD yang paling tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran tahunan pembangunan daerah serta penyelesaian permasalahan pembangunan daerah. Selain itu, prioritas juga berfungsi untuk memaksimalkan pendanaan yang terbatas di daerah. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*). Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018. Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun 2018, dan berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Penyusunan prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2017 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2018, masalah dan tantangan yang merujuk pada prioritas pembangunan.

Dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya bagi program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Secara lebih urut dan detail dapat dijelaskan bahwa dalam prosesnya, penetapan prioritas pembangunan tahun 2018 secara bertahap melalui tahapan:

1. Pengolahan data dan informasi. Dalam tahap ini dikumpulkan dan dievaluasi data dan informasi pembangunan yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 dan yang ditargetkan pada tahun berjalan (2017). Hasil pengumpulan data dan informasi digunakan untuk melakukan analisis dan merumuskan gambaran umum kondisi daerah, kemampuan ekonomi dan keuangan daerah, serta capaian kinerja pembangunan daerah;
2. Penelaahan kebijakan yang harus dipedomani. Dokumen perencanaan jangka menengah maupun tahunan yang menjadi pijakan perencanaan tahunan, baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat ditelaah

dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah tahun 2017 dengan provinsi maupun pusat. Dokumen perencanaan yang menjadi bahan penelaahan pada penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah:

- o Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
- o Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- o Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;

Selain dokumen perencanaan dimaksud, juga ditelaah rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang yang disampaikan secara resmi dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD maupun Surat Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Jombang Tahun 2016;

3. Perumusan permasalahan. Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2016 serta target kinerja tahun 2017 yang disandingkan dengan rencana pentahapan tahun 2018, sesuai sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD, maka disusun rancangan identifikasi permasalahan daerah. Perumusan permasalahan pembangunan daerah sesuai mekanisme tersebut menggunakan pendekatan *gap expectation* (kesenjangan target daerah/SPM dengan realisasi capaian);
4. Penyusunan rancangan prioritas, sasaran pembangunan, program prioritas dan pagu indikatif. Rangkaian lanjutan dari hasil pengolahan data dan informasi serta penelaahan yang telah dilaksanakan adalah perumusan prioritas, sasaran, program dan indikatif anggaran. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Dalam rangka implementasi percepatan pembangunan desa (alokasi 500 juta per desa per tahun), maka ditetapkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pagu Indikatif Desa (PID). Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi desa dalam merumuskan usulan kegiatan desa yang sesuai dengan prioritas kabupaten dimana secara lebih lanjut akan diakomodasi dalam penganggaran tahun 2018;
5. Pelaksanaan musrenbang. Rancangan kebijakan pembangunan sampai dengan program yang telah disusun dikonsultasikan kepada publik melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) penyusunan RKPD. Pelaksanaan musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan kabupaten untuk membahas dan menyepakati rencana penanganan serta indikatif anggaran yang akan dialokasikan dalam perencanaan pembangunan daerah (RKPD) maupun kegiatan teknis SKPD (Renja SKPD). Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan musrenbang, telah digunakan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) serta kertas kerja PID yang ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pendokumentasian pelaksanaan musrenbang;
6. Penyelarasan rencana program prioritas beserta pagu indikatifnya. Tahapan ini diperlukan untuk menyesuaikan rencana belanja pembangunan daerah dengan kemampuan anggaran yang ada. Selain daripada itu, penyelarasan juga ditujukan untuk penyesuaian kebijakan dan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi setelah mengikuti pelaksanaan musrenbang provinsi dan musrenbang nasional.

Penyelarasan juga dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perda kelembagaan yang baru serta perkembangan proyeksi kemampuan keuangan daerah.

4.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018

Rancangan prioritas pembangunan nasional tahun 2018 yang disampaikan Pemerintah dalam penyelenggaraan musrenbang nasional penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, yaitu:

- (a) Tema pembangunan tahun 2018 adalah **“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**;
- (b) Perkuatan Implementasi *Money Follow Program* dalam penyusunan RKPD Tahun 2018, yaitu:
 - 1. Menajamkan Prioritas Nasional (10 PN dan 30 Program Prioritas)
 - 2. Memastikan pelaksanaan program (Pengendalian dilakukan sampai ke level proyek satuan 3)
 - 3. Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan (Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer Ke Daerah, PHLN, BUMN, PINA Dan Swasta)
- (c) Agenda prioritas pembangunan nasional yang secara berkelanjutan diimplementasikan dalam periode pembangunan tahun 2015-2019 adalah Nawa Cita, yaitu:
 - 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara;
 - 2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
 - 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
 - 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
 - 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
 - 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
 - 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;
 - 8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
 - 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial;
- (d) Penyusunan RKP tahun 2017, pemerintah melakukan pendekatan:
 - 1. **Holistik-Tematik:** Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah;
 - 2. **Integratif:** Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan);
 - 3. **Spasial:** pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.
- (e) Target Pertumbuhan Ekonomi 2018: Sisi Produksi
 - A. 6 Sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan adalah:
 - 1) Industri pengolahan, terutama nonmigas
 - 2) Pertanian
 - 3) Perdagangan
 - 4) Informasi dan Komunikasi

- 5) Konstruksi
 - 6) Jasa Keuangan
- B. 3 Sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah:
- 1) Industri pengolahan
 - 2) Pertanian
 - 3) Pariwisata

Tabel 4.1.
Komponen Sisi Produksi Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Komponen Sisi Produksi	Pertumbuhan (%)	Share (%)
PDB	5,4- 6,1	100
- Industri Pengolahan	5,1-5,7	20,8-21,0
- Konstruksi	7,7-8,4	11,3-11,4
- Perdagangan	5,6-6,3	13,2-13,2
- Informasi dan Komunikasi	10,5-11,9	3,7-3,8
- Jasa Keuangan	10,6-11,5	4,4-4,5
- Pertanian	3,6-4,0	12,8-12,9
- Transportasi	8,3-9,2	5,6-5,6
- Listrik dan Gas	5,8- 6,8	1,2-1,2

Sumber: Hasil Simulasi Bappenas

- (f) Target kondisi makro ekonomi nasional dan sasaran pokok pada tahun 2018, yaitu:
- o Pertumbuhan ekonomi : 5,4 – 6,1%
 - o Inflasi : 3,5 ± 1
 - o Pengangguran : 5,3 – 5,5%
 - o Angka kemiskinan : 9 – 10%
 - o Gini rasio (indeks) : 0,38

Sumber data: Rancangan RKP Tahun 2018, Data diolah

- (g) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan. Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dll. Selain itu juga bisa dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan, berikut ini prioritas pembangunan nasional tahun 2018 yaitu:

1. Prioritas Nasional Pendidikan

a) Program Prioritas Pendidikan Vokasi, dengan kegiatan prioritas:

1. Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri;
2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi;
3. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja;
4. Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas;
5. Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi;

b) Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru, dengan kegiatan prioritas:

1. Revitalisasi LPTK;
2. Peningkatan Profesionalisme Guru;
3. Pengelolaan dan Distribusi Guru;
4. Peningkatan Kesejahteraan Guru;

2. Prioritas Nasional Kesehatan

a) Program Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Perbaikan Kualitas Gizi Ibu dan Anak;
3. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;

b) Program Prioritas Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
3. Surveilans, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan;

c) Program Prioritas Penguatan Preventif Dan Promotif "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat"

1. Peningkatan lingkungan sehat;
2. Peningkatan pemahaman hidup sehat;
3. Peningkatan konsumsi pangan sehat;

3. Prioritas Nasional Perumahan Dan Pemukiman

a) Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak

1. Penciptaan Iklim Kondusif Penyediaan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
2. Penataan Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
3. Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
4. Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman

b) Program Prioritas Air Bersih Dan Sanitasi

1. Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi;
2. Peningkatan Ketersediaan Air Baku;

4. Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata

a) Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

1. Pengembangan Danau Toba;
2. Pengembangan Borobudur dan Sekturnya;
3. Pengembangan Mandalika;
4. Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas;

b) Program Prioritas Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus

1. Percepatan Pembangunan KEK Sorong;
2. Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang;
3. Percepatan Pembangunan KEK Bitung
4. Percepatan Pembangunan KEK MBTK
5. Percepatan Pembangunan KEK Morotai

c) Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI)

1. Pengembangan KI Sei Mangkei;
2. Pengembangan KI Morowali;
3. Pengembangan KI Bantaeng;
4. Dukungan Pengembangan Kawasan Industri;

d) Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi Dan Penciptaan Lapangan Kerja

1. Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan;
2. Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu;
3. Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi;
4. Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat;

5. Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri;
6. Penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif;
7. Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
8. Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja;
9. Layanan Informasi Pasar Kerja;

e) Program Prioritas Pengembangan Ekspor Barang Dan Jasa

1. Peningkatan Fasilitas Ekspor;
2. Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor;
3. Peningkatan Efektivitas Promosi dan Akses Pasar;
4. Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha;
5. Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah.

5. Prioritas Nasional Ketahanan Energi

a) Program Prioritas Energi Baru Terbarukan (Ebt) Dan Konservasi Energi

1. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro dan Nuklir;
2. Pengembangan PLT Panas Bumi;
3. Pengembangan Bioenergi;
4. Penyempurnaan *Feed-In-Tariff*, Subsidi dan Kelembagaan EBT;
5. Implementasi Teknologi Energi Bersih dan Efisien;
6. Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (*Small Grid System*);
7. Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi;
8. Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik;
9. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
10. Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi;
11. Pembentukan Cadangan Penyangga Energi;
12. Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi;
13. Pemenuhan DMO Batubara dan Gas Bumi.

6. Prioritas Nasional Ketahanan Pangan

a) Prioritas Nasional Ketahanan Pangan

1. Produksi Padi 79,3 juta ton;
2. Produksi Jagung 23,4 juta ton;
3. Produksi Kedelai 2,3 juta ton;
4. Produksi Gula 3,2 juta ton;
5. Produksi Daging Sapi 710 ribu ton;
6. Produksi Cabai Merah 1,2 juta ton, Cabai Rawit 782,3 ribu ton, dan Bawang Merah 1,3 juta ton
7. Produksi Jeruk 1,9 juta ton dan Buah lainnya
8. Produksi Ikan 17,3 juta ton dan garam 4,1 juta ton

b) Program Prioritas Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pertanian

1. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
2. Pengelolaan waduk, embung, situ, serta bangunan penampung air lainnya;
3. Perluasan lahan pertanian;
4. Alat dan mesin pertanian;
5. Sarana pasca panen;
6. Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi;
7. Sarana dan prasarana peningkatan konsumsi pangan di 34 provinsi.

7. Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan

a) Program Prioritas Jaminan Dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

1. Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah;
2. Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial;
3. Peningkatan Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan;

4. Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat;
 5. Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran
 6. Peningkatan Akses Masyarakat Kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
 7. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar;
 8. Peningkatan Inklusivitas Pelayanan dasar;
 9. Penyediaan Layanan Dasar;
 10. Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha;
 11. Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran;
 12. Pengembangan Kewirausahaan;
 13. Perluasan Akses Pembiayaan;
 14. Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha;
 15. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Kemitraan Usaha;
- 8. Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas Dan Kemaritiman**
- a) **Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara & Inter-moda)**
 1. Konektivitas;
 2. Aksesibilitas;
 3. Transportasi Perkotaan;
 - b) **Pengembangan Telekomunikasi Dan Informatika**
 1. Akses Internet Untuk Daerah Non Komersil;
 2. Penguatan Penyiaran Di Daerah Perbatasan;
 3. Optimalisasi Penggunaan TIK Pada Instansi Pemerintah;
 4. Dukungan TIK Pada Sektor Prioritas (E-commerce, E-health, Dll);
 5. Pembangunan Jaringan Pita Lebar .
- 9. Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah**
- a) **Program Prioritas Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan**
 1. Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi;
 2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi;
 3. Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi;
 4. Penguatan Pemerintahan Desa;
 5. Pengawasan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan;
 6. Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota;
 7. Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan.
 - b) **Program Prioritas Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana**
 1. Pemberdayaan Masyarakat
 2. Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana
 3. Sarana dan Prasarana Kebencanaan
 4. Pelayanan Dasar Kebencanaan
 5. Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana
 6. Pengelolaan SDA dan LH Berkelanjutan
 7. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi
 - c) **Program Prioritas Reforma Agraria**
 1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria
 2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria
 3. Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria
 4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA

5. Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah
d) Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;
2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
3. Penguatan Ekonomi Lokal
4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar
5. Pengembangan Konektivitas Wilayah
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan
7. Perlindungan Sosial dan Pemberantasan Kemiskinan
8. Penataan Kelembagaan dan Regulasi, dan Tanah Ulayat

4.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2018 mengambil tema “ **Mengacu Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Meningkatkan Industri, Perdagangan, Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur**”. Selaras dengan misi pembangunan jangka menengah dan tema pembangunan tahun 2018, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

Tabel 4.2.

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Prioritas	Sub Prioritas
1. Penanggulangan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan dan Perlindungan Sosisal terpadu berbasis Keluarga; 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 3. Pemberdayaan Ekonomi Mikro dan Kecil; 4. Peningkatan Peran Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa; 5. Pelatihan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna; 6. Optimalisasi lembaga masyarakat serta penguatan fasilitasi pendampingan masyarakat perdesaan; 7. Peningkatan Prasarana Dan Sarana Untuk Meningkatkan Perekonomian Dan Jangkauan Mobilitas Masyarakat Miskin.
2. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program padat karya produktif; 2. Pengembangan wirausaha; 3. Menyiapkan tenagakerja terampil; 4. Peningkatan ketrampilan dan Kompetensi tenaga kerja; 5. Sertifikasi bagi tenaga kerja.
3. Peningkatan Mutu Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)/Bosda Madin; 2. Bantuan sarana dan prasarana SMK; 3. SMKmini/BLK Plus.
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan AKI dan AKB; 2. Pengendalian Penyakit HIV, TB, Malaria; 3. Penurunan Prevansi Kurang Gizi dan Stunting 4. Penataan Jaminan Kesehatan Nasional (Sistem Rujukan); 5. Peningkatan Kesehatan Lingkungan; 6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

5. Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah

d) Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;
2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
3. Penguatan Ekonomi Lokal
4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar
5. Pengembangan Konektivitas Wilayah
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan
7. Perlindungan Sosial dan Pemberantasan Kemiskinan
8. Penataan Kelembagaan dan Regulasi, dan Tanah Ulayat

4.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2018 mengambil tema “ **Mengacu Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Meningkatkan Industri, Perdagangan, Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur**”. Selaras dengan misi pembangunan jangka menengah dan tema pembangunan tahun 2018, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

Tabel 4.2.

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Prioritas	Sub Prioritas
1. Penanggulangan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan dan Perlindungan Sosisal terpadu berbasis Keluarga; 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 3. Pemberdayaan Ekonomi Mikro dan Kecil; 4. Peningkatan Peran Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa; 5. Pelatihan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna; 6. Optimalisasi lembaga masyarakat serta penguatan fasilitasi pendampingan masyarakat perdesaan; 7. Peningkatan Prasarana Dan Sarana Untuk Meningkatkan Perekonomian Dan Jangkauan Mobilitas Masyarakat Miskin.
2. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program padat karya produktif; 2. Pengembangan wirausaha; 3. Menyiapkan tenagakerja terampil; 4. Peningkatan ketrampilan dan Kompetensi tenaga kerja; 5. Sertifikasi bagi tenaga kerja.
3. Peningkatan Mutu Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)/Bosda Madin; 2. Bantuan sarana dan prasarana SMK; 3. SMKmini/BLK Plus.
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan AKI dan AKB; 2. Pengendalian Penyakit HIV, TB, Malaria; 3. Penurunan Prevalensi Kurang Gizi dan Stunting 4. Penataan Jaminan Kesehatan Nasional (Sistem Rujukan); 5. Peningkatan Kesehatan Lingkungan; 6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

Prioritas	Sub Prioritas
	(Pasung); 7. Peningkatan Kualitas Ponkesdes; 8. Pendayagunaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan yang Bermutu; 9. Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah.
5. Peningkatan Infrastruktur	1. Mudik Balik Gratis; 2. Pengembangan Sistem Informasi Jembatan Timbang (JT); 3. Pengadaan dan Pemasangan Early Warning System (EWS) di Perlintasan Sebidang KA se-Jawa Timur; 4. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan; 5. Pembangunan Pelabuhan Laut di kepulauan; 6. Pembangunan Bandara; 7. Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan (JLS); 8. Pembebasan lahan jalan tembus Sukorejo - Batu; 9. Peningkatan Jalan Malang -- Pendem - Batu 10. Penanganan Rekonstruksi Jalan (18 ruas jalan, 85.838 km); 11. Penyusunan Master Plan Transportasi Malang Raya; 12. Penyelenggaraan SPAM Regional; 13. Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa); 14. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); 15. Pembangunan SPAM di daerah rawan air (kekeringan); 16. Fasilitasi Pengembangan TPA Regional; 17. Rehab Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi; 18. Pengembangan Kawasan Agropolitan; 19. Pembangunan, rehabilitasi dan normalisasi sarana/prasarana pengendali banjir; 20. Operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
6. Peningkatan Kedaulatan Pangan	1. Pengendalian Alih Fungsi Lahan; 2. Perbaikan Infrastruktur Irigasi; 3. Pengembangan pertanian organik; 4. Pembangunan Desa Mandiri Benih / Bibit; 5. Peningkatan produksi ikan, garam, rumput laut; 6. Stabilisasi Harga Padi dan pangan lain; 7. Peningkatan produksi padi dan pangan lain.
7. Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1. Penguatan & Pengembangan 26 Kantor Perwakilan Dagang; 2. Pengembangan Wirausaha Baru Agroindustri (IKM Agro); 3. Pengembangan Wirausaha Baru Non Agroindustri (IKM Non-Agro); 4. Pengembangan standardisasi;

Prioritas	Sub Prioritas
	5. Pengendalian & Pengawasan Produk Impor; 6. Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG); 7. Pengendalian harga.
8. Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur	1. Pembangunan Rumah Mojopahit; 2. Revitalisasi Makam Wali/Sunan; 3. Revitalisasi Budaya dan Kearifan Lokal; 4. Pelestarian warisan seni budaya tradisi bertaraf regional, nasional, dan internasional; 5. Peningkatan Kapasitas UMKM di Destinasi Pariwisata serta fasilitasi Komunitas Produk Ekonomi Kreatif; 6. Promosi kepariwisataan ; 7. SDM Pariwisata.
9. Percepatan Reformasi Birokrasi	1. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS; 2. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka; 3. Profesionalisasi PNS; 4. Pengembangan e-Government; 5. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri; 6. Penyederhanaan Perizinan Usaha; 7. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur; 8. Penataan Struktur Birokrasi.

Sumber data: Bahan Musrenbang Provinsi Penyusunan RKPD Tahun 2018, Data diolah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah telah memasuki babak baru seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014–2019 sehingga melakukan perubahan target sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan RPJMD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	TARGET		
		2017	2018	2019
1	Pertumbuhan PDRB/LPE (%)	5,56 - 5,86	5,61 - 5,96	5,66 - 6,06
2	Indeks Gini	0,390 - 0,400	0,385 - 0,400	0,380 - 0,400
3	Indeks Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia (<40%)	18,00 - 18,20	18,00 - 18,40	18,40 - 18,60
4	Persentase Penduduk Miskin	11,80 - 11,50	11,50 - 11,20	11,20 - 10,90
5	Indeks Pembangunan Manusia	69,50 - 69,75	69,75 - 70,00	70,00 - 70,25
6	Indeks Pembangunan Gender	92,39 - 92,90	92,91 - 93,50	93,51 - 94,01
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,17 - 4,08	4,08 - 3,99	3,99 - 3,90
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,98 - 65,49	65,49 - 67,00	67,00 - 68,52
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,00 - 82,00	82,00 - 83,00	83,00 - 84,00
10	Indeks Reformasi Birokrasi	65,00 - 67,00	67,00 - 69,00	69,00 - 71,00
11	Indeks Kesalehan Sosial	> 60	> 60	> 60

Sumber data: Bahan Musrenbang Provinsi Penyusunan RKPD Tahun 2018, Data diolah

4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018

Penyusunan RKPD Kabupaten Jombang tahun 2018 merupakan implementasi rencana pembangunan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Kebijakan umum pembangunan tahun kelima (2018) dalam RPJMD Kabupaten Jombang adalah Perwujudan Jombang Sejahtera Untuk Semua. Kebijakan umum tersebut sekaligus sebagai tema pembangunan tahun 2018. Tema **“Perwujudan Jombang Sejahtera Untuk Semua”** sebagai tahapan dan upaya dalam mewujudkan Jombang sejahtera untuk semua. Dari tema tersebut terkandung dua agenda utama dalam pembangunan daerah tahun 2018.

Untuk mewujudkan tema pembangunan tahun 2018 disusun kerangka prioritas dan kinerja daerah yang akan mengarahkan program pembangunan daerah tahun 2018 yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan yang ditargetkan. Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 ada 10 (sepuluh), yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan dan Infrastruktur Daerah;
3. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan;
4. Penguatan Ketahanan Pangan;
5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peningkatan Peran Koperasi dan UMKM;
7. Penguatan Daya Dukung Lingkungan Hidup;
8. Peningkatan Peran Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Penumbuhan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh;
10. Pelestarian Kearifan dan Budaya Lokal.

Sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan program kerja SKPD Tahun 2018, yaitu:

- Prioritas 1. Peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya derajat pendidikan;
 - b. Meningkatnya usia harapan hidup;
 - c. Terkendalinya pertumbuhan penduduk;
- Prioritas 2. Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan dan infrastruktur daerah, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya infrastruktur dasar masyarakat dan daerah;
 - b. Terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- Prioritas 3. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, dengan sasaran meliputi:
- a. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum;
 - b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - c. Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
 - d. Terwujudnya kerukunan didalam kehidupan sosial dan beragama;
- Prioritas 4. Penguatan ketahanan pangan, dengan sasaran meliputi :
- a. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan perikanan;
 - b. Terwujudnya ketahanan pangan daerah;
 - c. Meningkatkan infrastruktur dasar masyarakat dan daerah;
- Prioritas 5. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran meliputi:

- a. Terpulihkannya fungsi sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan masyarakat dan korban bencana;
- Prioritas 6. Peningkatan peran koperasi dan UMKM, dengan sasaran meliputi:
- a. Tumbuh-kembangnya sentra-sentra industri olahan;
 - b. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c. Meningkatkan pangsa pasar dalam negeri;
 - d. Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
- Prioritas 7. Penguatan daya dukung lingkungan hidup, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- Prioritas 8. Peningkatan peran pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya kapasitas kepemudaan, olah raga dan seni budaya;
 - b. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
- Prioritas 9. Penumbuhan kawasan strategis dan cepat tumbuh, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan perikanan;
 - b. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - d. Meningkatkan pangsa pasar dalam negeri;
- Prioritas 10. Pelestarian kearifan dan budaya lokal, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya kapasitas kepemudaan, olah raga dan seni budaya;
 - b. Meningkatnya kontribusi sub sektor pariwisata daerah.

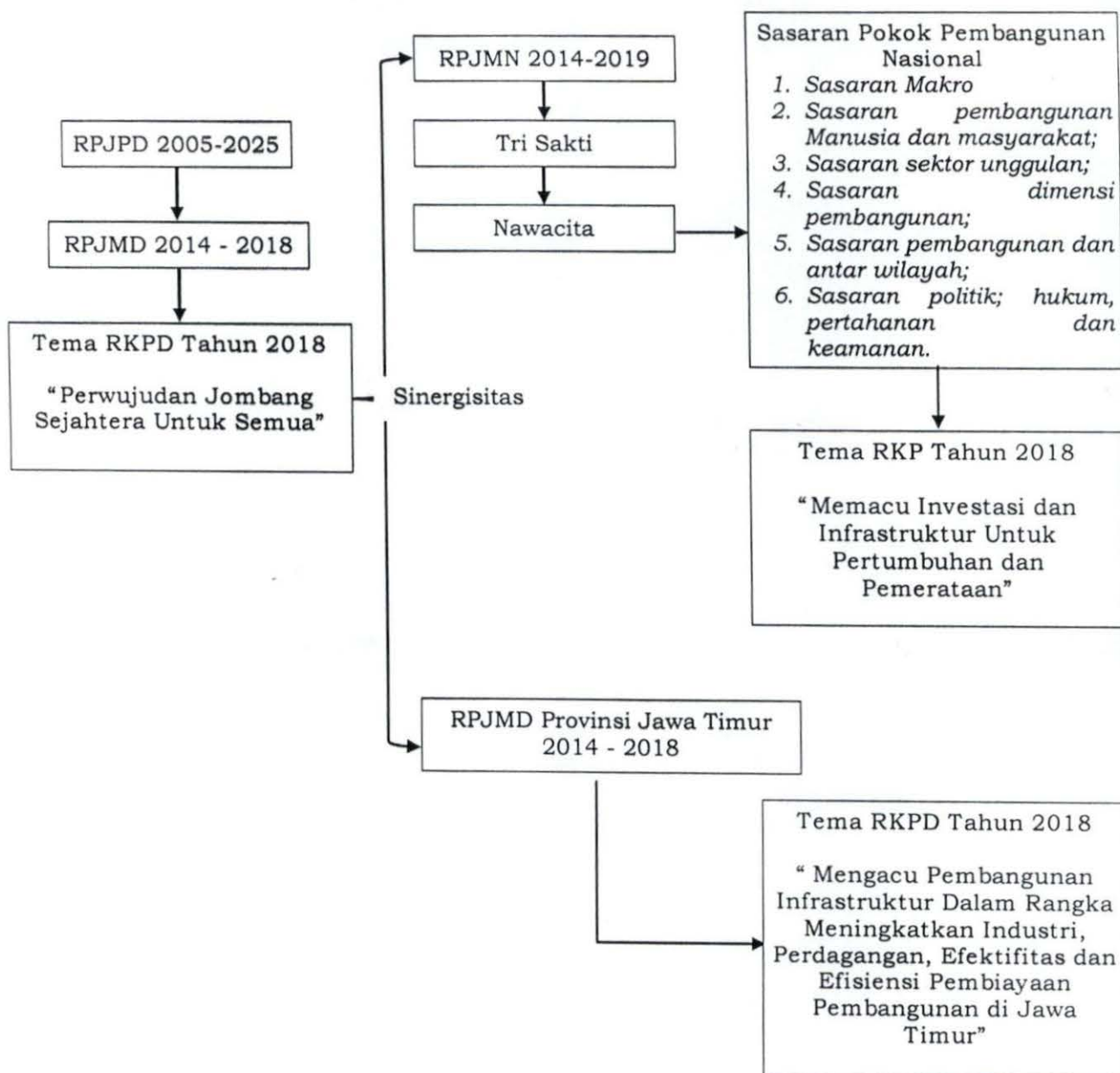
Secara lebih lanjut, prioritas dan sasaran yang direncanakan ditindaklanjuti dengan arah kebijakan, strategi, sampai dengan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD pada tahun 2018. Keselarasan antara prioritas, sasaran pembangunan, arah kebijakan dan strategi pembangunan dengan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 beserta indikatornya tersaji dalam tabel berikut:

4.4. Sinergisitas prioritas pembangunan Kabupaten Jombang dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Timur

Agenda prioritas pembangunan nasional merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, baik dalam konteks perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan maupun pada wilayah provinsi dan kabupaten, dalam hal ini Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jombang. Interkoneksi prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Jombang dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RKP/RKPD secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Diagram 4.4

Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Tahun 2018 antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jombang



Untuk sinkronisasi program Kabupaten Jombang yang interkoneksi dengan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DENGAN PROGRAM KERJA TAHUN 2018

PRIORITAS 1. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DASAR KEPADA MASYARAKAT

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	SKPD
Meningkatnya Derajat Pendidikan	Meningkatkan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar	Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya kompetensi guru Pendidikan Anak Usia Dini 100.00 Prosen	1.258.316.500	Dinas Pendidikan
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam jumlah dan kualitas yang memadai	Program Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar 6 Tahun (Pembangunan)	Rasio kelas per siswa	11.753.768.400	Dinas Pendidikan
		Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu bagi masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan mengikuti pendidikan formal	Program Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar 6 Tahun (Rehabilitasi Ringan)	Meningkatnya keamanan sekolah 100.00 prosen	1.307.300.000	Dinas Pendidikan
		Menyediakan beasiswa pendidikan dasar bagi siswa dari keluarga tidak mampu	Program Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar 6 Tahun (Rehabilitasi Sedang/Berat)	Meningkatnya keamanan sekolah 100.00 prosen	16.561.500.000	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar 9 tahun	Meningkatnya mutu pendidikan	13.660.000.000	Dinas Pendidikan
			Program Pendidikan Non Formal	Mengurangi angka putus sekolah tingkat SD,SMP 100.00 Prosen	639.000.000	Dinas Pendidikan
			Program Pengembangan Pendidikan Inklusi	Persentase anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan 78%	75.000.000	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Prasarana Penunjang Sekolah Dasar	Rasio bangku per siswa 1:2	215.200.000	Dinas Pendidikan
			Program Pembangunan/Peningkatan Perpustakaan Sekolah Dasar	Persentase SD mempunyai perpustakaan 59%	9.204.000.000	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Prasarana Penunjang Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun	Meningkatnya mutu pendidikan	630.000.000	Dinas Pendidikan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	SKPD
	Peningkatan kualitas lulusan pendidikan dasar	Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 6 tahun	Meningkatnya angka kelulusan SD	4.773.179.000	Dinas Pendidikan
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang mutu pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu Guru Profesional Jenjang TK, SD, SMP Negeri/Swasta sesuai dengan Permendiknas Nomor 9 Tahun 100.00 prosen	645.000.000	Dinas Pendidikan
		Mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan global, nasional, regional, maupun lokal	Program Pembangunan/peningkatan lapangan olah raga sekolah dasar	Meninkatnya kesehatan siswa 100.00 Prosen	545.070.000	Dinas Pendidikan
		Penataan manajemen pelayanan pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang terakreditasi A	1.008.000.000	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 tahun	Meningkatnya angka kelulusan SMP	8.486.487.000	Dinas Pendidikan
Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita, perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi	Menurunkan angka kematian ibu 89 per 100.000 KH, Menurunkan Angka Kematian Bayi 11,6 per 1000 KH, Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,25%	648.161.400	Dinas Kesehatan
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas Terakreditasi 76 %	1.909.398.000	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Pelayanan Kesehatan memenuhi syarat sesuai permenkes 75 sebesar 76%	22.700.000.000	Dinas Kesehatan
			Program pengawasan, pengendalian obat dan kesehatan makanan	Menurunnya Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Pada Makanan 22 %	113.000.000	Dinas Kesehatan
		Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan masalah kesehatan	Program Peningkatan Aparatur Kesehatan	Peningkatan Kepuasan Masyarakat 80%	200.000.000	Dinas Kesehatan
		Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya Obat, Perbekalan Kesehatan Habis Pakaidan Reagen unruk pelayanan Kesehatan dasar (12 bln)	6.048.388.000	Dinas Kesehatan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	SKPD
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial pada RSUD Jombang	Persentase capaian SPM Sarana Prasarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	10.000.000.000	RSUD Jombang
			Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso	Persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan di RSUD Ploso sebesar 100%	9.153.593.507	RSUD Ploso
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase angka kematian (CFR) kasus DBD < 1, UCI 100%, angka kesembuhan TB paru (BTA +) 92%, PTM tidak termasuk di 10 besar penyakit	1.383.134.800	Dinas Kesehatan
			Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso	Persentase capaian jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap RSUD Ploso sebesar 100%	4.761.573.490	RSUD Ploso
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Jombang	Peningkatan pelayanan kesehatan 90%	40.988.000.000	RSUD Jombang
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso	Persentase capaian standar minimal sarana prasarana penunjang layanan rujukan di RSUD Ploso sebesar 100%	1.320.000.000	RSUD Ploso
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Kesehatan Matra	Persentase desa sehat sebesar 23,52%	512.100.000	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Jombang	Persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan di RSUD Jombang 95.00 Persen	188.575.433.000	RSUD Jombang
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan rumah tangga sehat sebesar 85%	500.000.000	Dinas Kesehatan
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kepuasan Masyarakat 80%	66.969.259.375	Dinas Kesehatan
Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Pengendalian pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang	Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Pendewasaan Usia Perkawinan (Perempuan 20th, Laki-laki 25 tahun) 1240 remaja	70.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Terdatanya semua keluarga di 306 Desa	1.468.200.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	SKPD
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Meningkatnya pengetahuan Kader BKB,BKR, BKL dan UPPKS 355 Posyandu PADU	150.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga (LPP 1,71 %)	300.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatkan pembinaan, kepesertaan, dan kemandirian ber-KB	Program Keluarga Berencana	Menurunnya TFR DARI 2,3% menjadi 2,1 %	3.585.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PRIORITAS 2. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN DAN INFRASTRUKTUR DAERAH						
Meningkatnya Infrastruktur Dasar Masyarakat dan Daerah	Mempercepat pemerataan pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur jalan untuk mengurangi disparitas wilayah	Mengoptimalkan percepatan rehabilitasi jalan, peningkatan struktur jalan strategis dan pemeliharaan berkala	Program Pembangunan Jembatan	Terwujudnya pembangunan jembatan (1 lokasi)	11.000.000.000	Dinas PU dan Penataan Ruang
			Program Pemeliharaan Rutin Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman	Meningkatnya kelancaran transportasi desa antar permukiman (4 ruas)	2.000.000.000	Dinas Perumahan dan Pemukiman
			Program Pemeliharaan Rutin Jalan	Meningkatnya kondisi ruas jalan yang mengalami rusak ringan 100%	4.000.000.000	Dinas PU dan Penataan Ruang
			Program Pemeliharaan Berkala Jalan		23.421.030.000	Dinas PU dan Penataan Ruang
			Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan	Terwujudnya pengamanan badan jalan (3 UPTD)	1.500.000.000	Dinas PU dan Penataan Ruang
			Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan	Tersedianya lahan untuk jalan akses menuju jembatan maupun meningkatnya kualitas jalan yang dalam kondisi rusak ringan 20%	2.770.000.000	Dinas PU dan Penataan Ruang
			Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan	Meningkatnya kondisi ruas jalan yang mengalami rusak berat di (37 ruas)	112.764.480.000	Dinas PU dan Penataan Ruang
			Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman	Meningkatnya ruas jalan desa yang dapat dipertahankan umur konstruksinya	1.595.600.000	Dinas Perumahan dan Pemukiman
			Program Rehabilitasi Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman	Meningkatnya jumlah ruas jalan desa dalam kondisi baik	2.721.197.140	Dinas Perumahan dan Pemukiman

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	SKPD	
			Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman	Meningkatnya kelancaran transportasi desa antar permukiman (52 ruas)	32.300.000.000	Dinas Perumahan dan Pemukiman	
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Di Lingkungan Permukiman	Memperlancar arus lalu lintas jalan pedesaan (18 ruas)	1.600.000.000	Dinas Perumahan dan Pemukiman	
			Program Rehabilitasi Jalan	Meningkatnya kondisi ruas jalan yang mengalami rusak sedang (17 ruas)	27.601.200.000	Dinas PU dan Penataan Ruang	
			Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan	Beroperasinya alat berat sesuai dengan fungsinya 100%	4.975.104.000	Dinas PU dan Penataan Ruang	
			Program Penyelenggaraan Laboratorium Kebinamargaan	Terselenggaranya layanan laboratorium kebinamargaan	138.435.000	Dinas PU dan Penataan Ruang	
			Program Pengawasan dan Pengendalian	Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian (4 UPTD)	600.000.000	Dinas PU dan Penataan Ruang	
		Penyediaan prasarana dan sarana penerangan jalan umum maupun listrik perdesaan	Program Penerangan Jalan Umum	Terwujudnya pengendalian beban biaya penggunaan energi listrik untuk penerangan jalan umum di 17 lokasi	5.065.000.000	Dinas PU dan Penataan Ruang	
		Meningkatnya Kapasitas dan kualitas jasa konstruksi	Penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi infrastruktur	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kemampuan para penyedia jasa konstruksi (100%)	100.000.000	Dinas Perumahan dan Pemukiman
		Meningkatnya Kualitas Air Minum Dan Sanitasi Permukiman Perkotaan	Percepatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik	Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat melalui pembangunan IPAL Komunal (6 desa)	1.740.000.000	Dinas Perumahan dan Pemukiman
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih	Tercukupinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah rawan air bersih (13 lokasi)	5.015.000.000	Dinas Perumahan dan Pemukiman
	Percepatan penanganan drainase permukiman		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Trotoar	Memperlancar patusan air hujan sepanjang (10 lokasi)	5.282.750.000	Dinas Perumahan dan Pemukiman	
	Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak	Percepatan penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Meningkatnya sarana dan prasarana di area pemakaman (2 lokasi)	400.000.000	Dinas Perumahan dan Pemukiman	

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	SKPD
			Program Pengembangan Kinerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman	Terselenggaranya Fasilitas/ Koordinasi Pelayanan Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman (12 bulan)	6.350.000.000	Dinas Perumahan dan Pemukiman
			Program Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus	Meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman (138 desa)	4.150.000.000	Dinas Perumahan dan Pemukiman
			Program Pengembangan Perumahan Formal	Meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman khususnya kawasan perumahan formal (2 lokasi)	700.000.000	Dinas Perumahan dan Pemukiman
			Program Pengembangan Perumahan Swadaya	Meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi MBR (250 unit)	8.250.000.000	Dinas Perumahan dan Pemukiman
	Peningkatan cakupan layanan persampahan dan penanganan limbah cair domestik	Meningkatkan pengelolaan persampahan dari control landfill menjadi sanitary landfill	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan persampahan (12 bulan)	15.537.774.000	Dinas Lingkungan Hidup
Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas	Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi	Peningkatan pelayanan dan pembinaan bidang transportasi, Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan, dan optimalisasi pelayanan kelaikan kendaraan bermotor	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya kesadaran dan ketertiban berlalu lintas bagi para pengguna jalan (100%)	513.200.000	Dinas Perhubungan
			Program Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Transportasi LLAJ	Beroperasinya sarana perhubungan yang layak (100%)	532.120.000	Dinas Perhubungan
			Program Pengendalian, Pengamanan Lalu Lintas dan Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Menurunnya angka kejadian laka lantas (25%)	1.066.000.000	Dinas Perhubungan
			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Meningkatnya jumlah kendaraan yang memenuhi standart layak uji kendaraan (80%)	558.274.000	Dinas Perhubungan
			Program Peningkatan Kesadaran dan Keselamatan Lalu Lintas	Meningkatnya peranserta masyarakat dalam penyusunan dokumen lalu lintas (75%)	85.000.000	Dinas Perhubungan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	SKPD
			Program Pengelolaan dan Pengembangan sarana dan prasarana Area Parkir Khusus Angkutan Barang	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan aktifitas bongkar muat di area parkir khusus angkutan barang (75%)	365.500.000	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Perparkiran	Meningkatkan layanan parkir di kawasan perkotaan (100%)	2.150.000.000	Dinas Perhubungan
PRIORITAS 3. PENINGKATAN TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN						
Terwujudnya kerukunan di dalam kehidupan sosial dan beragama	Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama masyarakat	Fasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana ibadah dan lembaga keagamaan	Program Peningkatan Sarana Prasarana Ibadah serta Lembaga Keagamaan	Persentase terlaksananya fasilitasi sarana prasarana ibadah serta lembaga keagamaan (100 %)	4.433.979.525	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	Peningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kondusifitas daerah	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	Program pengembangan wawasan kebangsaan dan Hak Asasi Manusia	Tidak terjadi konflik SARA dan Pelanggaran HAM di Jombang	159.328.500	Badan Kesatuan Bangsa Politik
		Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Menurunnya jumlah kenakalan remaja	37.934.000	Badan Kesatuan Bangsa Politik
			Program Partisipasi Sosial Masyarakat	Terwujudnya per tisipasi Sosial masyarakat dalam usa ha kesejahteraan sosial (80%)	40.400.000	Dinas Sosial
Terpeliharanya Keamanan Dan Ketertiban Umum	Peningkatan kualitas SDM Linmas dan Satpol PP		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya jumlah penanganan gangguan Tibum bagi masyarakat 70 %	356.564.579	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatkan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Menurunnya angka kriminalitas	126.726.000	Badan Kesatuan Bangsa Politik
	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Meningkatkan kewaspadaan dini dan pengendalian gangguan dan ketentraman umum	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	329.342.000	Badan Kesatuan Bangsa Politik
			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Tidak terjadi kerawanan daerah	349.200.000	Badan Kesatuan Bangsa Politik
	Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Program pendidikan politik masyarakat	1. Meningkatnya persentase pemilih menggunakan hak pilihnya 2. Prosentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	142.189.500	Badan Kesatuan Bangsa Politik